



MID IK PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima : **03 APR 2008**

Inventarisasi : **81/Fis/Hdl. 4/Per/2008.**

Klasifikasi : **R4 307.14 Set B**

Subjek : **Community Development**

Perpustakaan UAJY



0900007709

**“Babonisasi” Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Menciptakan Kecukupan Gizi Keluarga
(Studi Evaluasi tentang Pelaksanaan Program “Babonisasi Di Kecamatan
Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**Oleh :
Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JANUARI 2006**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

No. Proposal : 05/1/7/59

-
1. a. Judul Penelitian : "Babonisasi" Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Kecukupan Gizi Keluarga (Studi Evaluasi tentang Pelaksanaan Program "Babonisasi Di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- b. Macam Penelitian : Lapangan
-
2. Personalia Penelitian :
- a. Nama : Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia saat pengajuan proposal : 39 tahun 7 bulan
- d. Jabatan akademik/Golongan : Peneliti Muda/ IV a
- e. Fakultas/Program Studi : Lembaga Penelitian
-
3. Personalia Anggota Peneliti (bila ada)
- a. Nama Anggota 1 (lengkap dengan gelar) : -
- b. Nama Anggota 2 (lengkap dengan gelar) : -
-
4. Lokasi Penelitian : Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi DIY
-
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) bulan
-
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)
- Stimulan dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta : Rp. 2.400.000,-
- Biaya sendiri : Rp. 1.400.000,-
-

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



LEMBAGA
PENELITIAN UNIVERSITAS

Christina. E. Mediastika, ST, Ph.D

Yogyakarta, 28 Januari 2006
Peneliti



Dra. E. Yuningtyas Setyawati, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akseptabilitas dan keberhasilan program "babonisasi" yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul. Sementara itu permasalahan yang digali dalam penelitian ini adalah sejauhmana program "Babonisasi" yang menjadi program unggulan Kabupaten Bantul dapat terealisasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar? Faktor pendukung dan penghambat apa yang menyebabkan program tersebut berhasil atau kurang berhasil?

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, khususnya di Kecamatan Srandakan. Jenis penelitian adalah menggunakan metode survey dengan melakukan penggabungan antara dua pendekatan yakni kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dijangkau melalui kuesioner, wawancara tak berstruktur, dan *in depth interview*. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan statistik deskriptif dan kemudian digunakan pula pendekatan kualitatif untuk memberikan informasi tambahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program babonisasi dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bantul pada umumnya dan masyarakat Srandakan pada khususnya. Kemanfaatan program babonisasi yang dirasakan oleh sebagian besar siswa penerima adalah terkait dengan pemenuhan gizi dan penambahan protein hewani. rata-rata sebagian besar adalah berasal dari siswa kelas 3 – 4 SD (56,00 %) dan rata-rata mereka adalah berjenis kelamin perempuan yakni ada sebanyak 32 orang (64,00 %). Pemberian bantuan ayam babon dari hasil penelitian ini telah tepat sasaran, karena sebagian besar (lebih dari 50,00 %) adalah berasal dari keluarga strata bawah. Oleh karena itu dengan kemampuan yang terbatas maka kelompok kemudian dapat memenuhi kebutuhan gizinya karena mereka memperoleh bantuan ayam babon.

Sebagian besar responden saat inipun telah dapat menikmati telur dari program babonisasi tersebut, dan sampai saat ini sudah ada sebanyak 22 orang siswa (44,00 %) yang telah memanfaatkan daging dan telur untuk peningkatan kebutuhan gizi mereka, sementara yang baru memanfaatkan telur saja dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka adalah sebanyak 15 orang (30,00 %), dan sebanyak 5 orang (10,00 %) yang menyatakan sampai saat ini mereka baru memanfaatkan dagingnya saja untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka. Sedangkan ada sebanyak 8 orang (16,00 %) yang menyatakan hingga saat ini mereka tidak pernah memanfaatkan baik daging maupun telur dari ayam hasil bantuan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka telah menjual ayamnya yang dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya : ayam tersebut sakit-sakitan dan kemudian juga ada yang menjual untuk mencukupi kebutuhan sekolah siswa.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program "babonisasi" yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul telah dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat yakni berupa peningkatan kebutuhan gizi bagi anak-anak SD. Di samping itu melalui program ini pula telah dapat memberi kontribusi untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Secara menyeluruh program "babonisasi" sudah mengarah pada upaya pemberdayaan masyarakat, karena dengan program tersebut masyarakat diarahkan untuk dapat berjiwa kewirausahaan. Namun program yang dilaksanakan akan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal jika dilakukan secara komprehensif dan lintas sektoral.

Kata kunci : program babonisasi, pemenuhan gizi anak, dan pemberdayaan masyarakat.

KATA PENGANTAR

Penelitian yang berjudul "'Babonisasi' Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menciptakan Kecukupan Gizi Keluarga (Studi Evaluasi tentang Pelaksanaan Program 'Babonisasi' Di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", dilakukan untuk mengetahui sejauhmana program "Babonisasi" yang menjadi program unggulan Kabupaten Bantul dapat terealisasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar? Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat apa yang menyebabkan program tersebut berhasil atau kurang berhasil?

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang memerlukannya, yakni terutama ditujukan bagi para pembaca dan peneliti yang menekuni kajian pemberdayaan masyarakat. Tidak terkecuali juga hasil penelitian ini ditujukan pula bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat lokal, regional maupun nasional, agar dapat dijadikan sebagai bahan literatur dan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan yang lebih berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan proses penyelesaian penelitian ini, tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Rektor serta para Pembantu Rektor di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung serta memberi kesempatan baik berupa moril maupun materiil kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
2. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini.
3. Tenaga lapangan yang dengan segenap waktu dan tenaganya membantu peneliti dalam pencarian data di lapangan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Camat Srandakan beserta staf yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan juga memberikan banyak informasi yang peneliti butuhkan.
5. Bapak Kepala Desa Trimurti dan Poncosari beserta staf di Kecamatan Srandakan yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Guru di lokasi penelitian yang telah banyak membantu guna memperlancar penelitian yang dilakukan.
7. Para responden yang telah sudi meluangkan waktu dan pikirannya, serta banyak memberikan informasi yang sangat berguna bagi analisis penelitian ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak pula membantu sehingga terselesaikannya penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa laporan hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dimohon saran dan kritik dari para pembaca sekalian yang bersifat membangun, serta mengarah kepada upaya perbaikan tulisan demi penyempurnaan hasil tulisan.

Akhir kata Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dapat penulis panjatkan, Karena berkat pertolongan-Nya maka penelitian dan tulisan ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama terkait dengan permasalahan mengenai pemberdayaan masyarakat.

Yogyakarta, Januari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Paradigma Baru Pembangunan Masyarakat	6
2.2. Pengembangan Masyarakat Menuju Pemberdayaan Masyarakat	7
2.3. Dimensi Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat	11
2.3.1. Pengertian Pemberdayaan	12
2.3.2. Indikator Pemberdayaan	13
2.4. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penciptaan Kemandirian Masyarakat	15
2.5. Pemberdayaan Dan Peran Masyarakat Pada Peningkatan Gizi Serta Kesehatan	18
2.6. Gizi Dan Pembangunan Masyarakat	21
2.6.1. Pembangunan Gizi Dan Kesehatan	21
2.6.1.1. Masalah Gizi Di Indonesia	22
2.6.1.2. Gizi Dan Pembangunan	22
2.6.1.3. Kebijakan Pangan, Gizi Dan Kesehatan	24
2.6.2. Krisis Ekonomi Dan Keadaan Gizi Penduduk	25
2.6.2.1. Kemiskinan Dan Gizi Buruk	25
2.6.2.2. Upaya Penanganan Gizi Buruk Dan Generasi Yang 'Hilang'	25
2.7. "Babonisasi" Sebagai Upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat	26
2.7.1. Gizi Anak Sekolah Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia	26
2.7.2. Kandungan Gizi Program PMT-AS Yang Dikonsumsi Anak-Anak SD	27
2.7.3. Perlu Mengkaji Ulang Program PMT-AS	28
2.7.4. Program "Babonisasi" Sebagai Terobosan Untuk Pemenuhan Gizi Anak SD	29

BAB III MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1. Masalah Penelitian	31
3.2. Tujuan Penelitian	32
3.2. Manfaat Penelitian	32
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1. Obyek Kajian dan Lokasi Penelitian	33
4.2. Populasi dan Sampel	33
4.3. Teknik Pengumpulan Data	33
4.4. Teknik Analisa Data	34
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1. Deskripsi Daerah Penelitian	35
5.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian	35
5.1.1.1. Kepadatan Penduduk Geografis	35
5.1.1.2. Kepadatan Penduduk Agraris	36
5.1.1.3. Kepadatan Penduduk Daerah Terbangun	37
5.1.1.4. Kepadatan Penduduk Kelompok Umur	38
5.1.1.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	38
5.1.1.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	39
5.1.1.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40
5.1.1.8. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1	41
5.1.1.9. Tenaga Kerja dan Pengangguran	42
5.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan	44
5.2. Status Sosial Ekonomi Responden Dan Keluarga	46
5.2.1. Identitas Penerima Bantuan	46
5.2.2. Kondisi Permukiman Keluarga Responden	47
5.2.3. Pendidikan Dan Pekerjaan Orang Tua Responden	49
5.3. Pelaksanaan Program Babonisasi Di Kabupaten Bantul	51
5.4. Evaluasi Pelaksanaan Program Babonisasi Di Kabupaten Bantul	55
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	62
6.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1.	Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat	10
TABEL 1.2.	Model-Model Pengembangan Masyarakat	10
TABEL 1.3.	Indikator Keberdayaan	15
TABEL 5.1.	Kepadatan penduduk geografis per kecamatan di Kabupaten Bantul tahun 2002 dan 2004	35
TABEL 5.2.	Kepadatan penduduk agraris per kecamatan di Kabupaten Bantul	36
TABEL 5.3.	Kepadatan penduduk agraris per kecamatan di Kabupaten Bantul	37
TABEL 5.4.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Tahun 2004	38
TABEL 5.5.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kab. Bantul per Kecamatan	39
TABEL 5.6.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenin kelamin di Kabupaten Bantul tahun 2001 dan 2003	39
TABEL 5.7.	Kepadatan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kab.Bantul Tahun 2003	40
TABEL 5.8.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2001 dan 2003	40
TABEL 5.9.	Jumlah penduduk Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 di Kabupaten Bantul tahun 2003	42
TABEL 5.10.	Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Bantul Tahun 2003	43
TABEL 5.11.	Pencari Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2003	43
TABEL 5.12.	Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2001 dan 2003 ..	43
TABEL 5.13.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	44
TABEL 5.14.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	45
TABEL 5.15.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	46
TABEL 5.16.	Kelas Dan Jenis Kelamin Responden	46
TABEL 5.17.	Kondisi Permukiman Keluarga Responden	48
TABEL 5.18.	Tingkat Pendidikan Ayah Dan Ibu Responden	49
TABEL 5.19.	Jenis Pekerjaan Pokok Ayah Dan Ibu Responden	50
TABEL 5.20.	Jumlah Pendapatan Orang Tua	50
TABEL 5.21.	Jumlah Anak Penerima Bantuan "Babonisasi" Dan Tahap Penerimaan ..	52
TABEL 5.22.	Frekuensi Bertelur Dan Cara Pemeliharaan Ayam	53
TABEL 5.23.	Pemanfaatan Telur Saat Pertama Kali Ayam Bertelur	53
TABEL 5.24.	Kondisi Perkembangan Ayam Saat Ini	54
TABEL 5.25.	Pemanfaatan Ayam Untuk Pemenuhan Gizi Anak	54

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.	Determinasi Masalah Gizi	19
GAMBAR 2.	Konsep Gizi Sebagai Input-Outcome	21



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang :

Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas ke bawah ('*top-down*'). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat Pusat (atas) dan dilaksanakan oleh Instansi Propinsi dan Kabupaten. Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar.

Pembangunan masyarakat yang komprehensif pada hakekatnya membutuhkan suatu perencanaan dan pemahaman mendalam mengenai situasi dan kondisi masyarakat yang akan dibangun. Pemahaman ini menjadi pijakan awal di dalam upaya menuju keberhasilan sebuah proses pembangunan. Dalam konteks inilah, maka pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat menjadi sangat urgen untuk dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya diharapkan akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggungjawab dan *handarbeni* terhadap program dan keberlanjutannya.

Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Pendek kata bahwa dengan pendekatan partisipatif diharapkan berkembangnya aktivitas yang berorientasi pada kompetensi dan tanggungjawab sosial anggota komunitas sendiri. Dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses maka ketrampilan analisis dan perencanaan menjadi tanggung jawab masyarakat sendiri.

Oleh karena itu dalam proses pembangunan desapun, warga masyarakat hendaknya tidak sekedar diposisikan sebagai objek, tetapi harus menjadi subjek dalam menentukan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, jika warga masyarakat melakukan penolakan terhadap suatu program tertentu, maka pemerintah setempat juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk merealisasikan program yang tidak disepakati tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya melibatkan tiga *stakeholder* utama yaitu negara, masyarakat dan swasta. Implementasi model pembangunan *top down* yang dilakukan selama Orde Baru telah menyebabkan proporsi dan konstelasi peranan tiga *stakeholders* pembangunan menjadi timpang. Negara dan swasta menjadi sangat dominan, sedangkan masyarakat berada pada posisi *marginal*. Model pembangunan tersebut cenderung memberikan akses pada sekelompok kecil masyarakat menguasai perekonomian dan meniadakan partisipasi pada level akar rumput (*grass roots*).

Sentralisasi dan uniformitas yang dibangun oleh rezim orde baru telah menyebabkan "lumpuhnya" partisipasi dan kreativitas masyarakat bawah. *State formation* yang sangat ekspansif telah merusak struktur dan kelembagaan sosial yang telah lama tergantikan dengan struktur dan kelembagaan birokrasi yang sumir dan formitas. Dengan demikian proses pembangunan yang dilakukan ternyata tidak mampu mewujudkan tujuan idealnya yaitu memperluas kapabilitas masyarakat dan membuat mereka lebih berdaya.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka diperlukan pendekatan pembangunan yang lebih berorientasi pada usaha menghilangkan *marginalisasi* dan memperkuat sektor masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang berbasis masyarakat (*community based development*) menjadi sangat relevan untuk direalisasikan. Konsep pembangunan masyarakat perlu dibedakan dengan konsep pembangunan pada umumnya, karena titik temu dari pembangunan masyarakat ini mengacu pada upaya "pelayanan manusia yang berbasis pada masyarakat" (*community based human services*). Pembangunan masyarakat pada hakekatnya menjadi antitesis dari pembangunan yang dibimbing oleh negara (*state led development*) dan bukan pula pembangunan yang digerakkan oleh pasar (*market driven development*).

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang berarti menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu melanjutkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan nasional tersebut perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu termasuk pembangunan bidang kesehatan (Depkes, 1999).

Kesehatan dan keadaan gizi masyarakat ditentukan oleh banyak faktor yang berkaitan mulai dari produksi pangan, distribusi, dan pemasaran, hingga ke tingkat konsumsi makanan dalam keluarga yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan perilaku. Oleh karena itu, perbaikan gizi harus merupakan rangkaian upaya terus menerus mulai

dari perumusan masalah, tujuan yang jelas, pemilihan prioritas, penentuan strategi yang tepat, identifikasi kegiatan yang tepat, serta adanya kejelasan tugas pokok dan fungsi institusi yang berperan di berbagai tingkat administrasi (Depkes dan WHO, 2000).

Masalah kemiskinan, pangan dan gizi bersifat multi dimensi, oleh karena itu penanganannya harus bersifat multi sektoral dan multi disiplin : Pertanian-Peternakan, Kesehatan, Industri-Perdagangan, dan Pendidikan dengan pemberdayaan masyarakat termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta. Agar pelaksanaan program pangan dan gizi serta kesehatan untuk masyarakat, khususnya masyarakat miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan/daerah urban berdaya guna dan berhasil guna, maka upaya tersebut perlu dilaksanakan secara terkoordinasi mulai dari penetapan kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi.

Permasalahan kemiskinan, pangan, gizi, dan kesehatan masyarakat yang kompleks dapat diketahui dengan mudah melalui tingginya angka statistik tentang masalah yang terjadi pada ibu dan anak. Dari data Profil Kesehatan Indonesia diketahui bahwa angka kematian Balita adalah 59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 dan angka kematian ibu maternal adalah 373 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1995 (Depkes, 2000). Disamping itu juga dapat dilihat dari besarnya anak Balita yang mengalami permasalahan gizi kurang dan gizi buruk (KEP) yaitu sebesar 4,3% pada tahun 1998 (Depkes, 2000) dan pada ibu hamil 16% (Soekirman, 2003). Tingginya angka kematian balita dan permasalahan gizi kurang dan gizi buruk sebetulnya dapat dicegah melalui melalui sistem pemantauan perkembangan anak dari Kartu Menuju Sehat di Posyandu dan pemantauan perkembangan anak di tingkat Sekolah Dasar.

1.2. Perumusan Masalah :

Kemiskinan seperti yang terdapat dalam *Millennium Development Goals* (MDG), yakni bila seseorang berpenghasilan dibawah satu dolar US per hari. Dan setiap negara harus berusaha untuk mengurangi kemiskinan menjadi setengahnya pada tahun 2015. Setiap negara berfokus pada intervensi untuk mengangkat perekonomian supaya tumbuh dan berusaha mengurangi kemiskinan melalui intervensi yang dapat mengurangi kemiskinan secara langsung. Sebagai contoh model intervensi kesehatan dan kontrol kesehatan yang mempunyai akibat pada peningkatan produktivitas dan kapasitas individu untuk meningkatkan pendapatan (Bahadur *et al.*, 2003).

Kemiskinan bisa terjadi di perdesaan namun dapat juga terjadi di perkotaan, tentu saja permasalahan dan kondisinya satu dengan lainnya sangat berbeda. Kemiskinan dapat terjadi secara biologis diturunkan melalui gizi. Seorang ibu yang gizinya baik akan menghasilkan anak yang sehat yang dapat tumbuh dengan baik. Tetapi seorang ibu yang tidak sehat akan menghasilkan anak yang tidak sehat bahkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang mempunyai risiko kematian 17 kali dibandingkan anak yang lahir normal. Hal lain pada BBLR adalah kemampuan kognitif lebih rendah dibandingkan bayi lahir normal, immunitas rendah dan morbiditas meningkat, sehingga mortalitas meningkat (Depkes, 2003). Sehingga seorang ibu dari keluarga miskin akan menghasilkan keturunan yang mutunya rendah sehingga nantinya keluarga mereka juga menjadi miskin, hal ini merupakan suatu lingkaran yang harus diputus melalui pembangunan.

Program Kesehatan Masyarakat adalah bagian dari program pembangunan kesehatan nasional yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan. Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan melalui peningkatan pengetahuan, sikap positif, pengembangan perilaku dan peran aktif individu, keluarga, dan masyarakat untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatan diri dan lingkungannya menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif (Depkes, 2003).

Sasaran program adalah terciptanya keberdayaan individu dan masyarakat dalam bidang kesehatan yang ditandai oleh peningkatan perilaku hidup sehat dan peran aktif dalam memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan diri dan lingkungan sesuai dengan sosial budaya setempat. Penelitian ini berusaha melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program "Babonisasi" yang menjadi suatu gerakan yang dicanangkan oleh Bupati Bantul dalam rangka pemberian gizi bagi anak-anak Sekolah Dasar. Melalui gerakan ini anak-anak Sekolah Dasar yang bersekolah di seluruh Kabupaten Bantul masing-masing diberi sebanyak tiga ekor ayam secara gratis untuk dipelihara dan juga dimanfaatkan hasil telurnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar anak-anak Sekolah Dasar yang ada dapat tercukupi kebutuhan gizinya, yakni dengan mengkonsumsi telur dari ayam peliharaannya.

Dalam pembagiannya sudah digariskan ketika ayam pertama kali bertelur, telurnya tidak boleh ditetaskan, tetapi diharapkan agar anak penerima ayam memakan telur itu sebagai tambahan gizi. Seekor dari tiga ekor ayam itu boleh disembelih untuk

tambahan gizi anak penerima. Sedang dua ekor sisanya bisa dikembangkan, sehingga bisa menjadi sandaran rutin bagi kebutuhan protein anak-anak usia SD.

Oleh karena itu permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah : sejauhmana program "Babonisasi" yang menjadi program unggulan Kabupaten Bantul dapat terealisasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat sekitar? Faktor pendukung dan penghambat apa yang menyebabkan program tersebut berhasil atau kurang berhasil?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Paradigma Baru Pembangunan Masyarakat

Pemerintah pusat maupun daerah sebaiknya belajar dari pengalaman kegagalan paradigma pertumbuhan yang merupakan ekspresi dari nuansa pembangunan elitis. Terbukti pembangunan telah menempatkan golongan elit pada posisi dominan. Ternyata kebijakan pembangunan seperti itu telah membawa efek buruk baik dalam tataran skala makor maupun mikro. Untuk itu belajar dari pengalaman tersebut maka perlu dilakukan reorientasi terhadap usaha pembangunan yang dilaksanakan.

Hasil-hasil pembangunan yang tidak dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat telah mengkondisikan ketimpangan dan ketergantungan yang berkepanjangan. Sekarang pemerintah memang telah menggunakan paradigma baru yakni paradigma pembangunan berkelanjutan, meskipun hal ini dirasa sudah sangatlah terlambat. Konsep yang ditawarkan oleh paradigma ini adalah pembangunan yang bersifat ramah lingkungan.

Pembangunan yang dilakukan hendaknya memperhatikan masalah sumber daya yang bersifat *renewable* atau *non renewable*. Dengan demikian pemakaian segenap potensi dan sumber daya pembangunan akan disertai dengan kebijakan pemeliharaan dan pemulihannya, atau dengan perkataan lain proses pembangunan tidak hanya sekedar eksploitatif semata terhadap potensi dan sumber daya, akan tetapi juga memperhatikan proses pembaharuannya (Sulistiyani, 2004).

Pembangunan berkelanjutan merupakan perpaduan antara bagaimana melakukan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang dimiliki sekaligus mempertimbangkan kelangsungan generasi selanjutnya.

Kemunculan konsepsi pembangunan alternatif tidak terlepas dari kegagalan model pertumbuhan ekonomi dalam mengatasi berbagai problema sosial di dalam masyarakat. *Mainstream* pembangunan dengan model pertumbuhan ekonomi terbukti telah gagal dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan perhatian terhadap kelestarian lingkungan. Bahkan yang terjadi, model ini telah banyak menghasilkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan otoritas kekuasaan negara sangat dominan yang cenderung sulit dikontrol oleh masyarakatnya.

Model pembangunan dengan orientasi pertumbuhan ekonomi, sebenarnya merupakan manifestasi dari teori modernisasi yang melihat bahwa keterbelakangan dan

ketertinggalan yang ada pada negara dunia ketiga dapat dikejar dengan strategi tertentu dan dengan waktu tertentu (*strategic and time dimension*).

Teori modernisasi pada hakekatnya dibangun berdasarkan dikotomi antara apa yang disebut modern dan apa yang dinamakan dengan tradisional (Abraham, 1991). Masyarakat modern merupakan simbol dari kemajuan, pemikiran yang rasional dan dianggap sebagai ciri dari masyarakat di negara-negara industri maju. Sementara masyarakat yang tradisional merupakan masyarakat yang belum maju, ditandai oleh cara berfikir yang irasional. Konsep rasional dan irasional tersebut mengacu dari konsep yang ditawarkan oleh Weber (Andreski, 1989), yakni disebutkan bahwa masyarakat rasional adalah masyarakat yang telah mengembangkan metode-metode yang bersifat ilmiah dan mengarah kepada kuantitas produktif, sedangkan irasional adalah mereka yang memiliki sifat kebalikannya. Berangkat dari adanya dikotomi tersebut, maka teori modernisasi berpandangan bahwa pembangunan dilakukan dalam upaya mengubah dari kondisi masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dan dari sesuatu yang irasional menjadi rasional. Berdasarkan asumsi tersebut maka banyak orang yang sangat percaya bahwa masyarakat dapat bergerak ke arah kemajuan karena pertumbuhan ekonomi akan dengan sendirinya menghasilkan pemerataan, keadilan, dan menghargai prinsip kemanusiaan.

2.2. Pengembangan Masyarakat Menuju Pemberdayaan Masyarakat

Program "Babonisasi" yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk Pengembangan Masyarakat atau selanjutnya disingkat dengan PM. PM memiliki fokus terhadap upaya menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Suharto, 2002).

PM seringkali diimplementasikan dalam bentuk (a) proyek-proyek pembangunan yang memungkinkan anggota masyarakat memperoleh dukungan dalam memenuhi kebutuhannya atau melalui (b) kampanye dan aksi sosial yang memungkinkan kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh pihak-pihak lain yang bertanggungjawab (Payne, 1995).

PM (*community development*) terdiri dari dua konsep, yaitu "pengembangan" dan "masyarakat". Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-

bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial-budaya. Menurut Mayo (1998) masyarakat dapat diartikan dalam dua konsep, yaitu :

Masyarakat sebagai sebuah "tempat bersama", yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. Masyarakat sebagai "kepentingan bersama", yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan mental.

Istilah masyarakat dalam PM biasanya diterapkan terhadap pelayanan-pelayanan sosial kemasyarakatan yang membedakannya dengan pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan "negara". Misalnya, "sektor masyarakat" sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersifat *bottom-up*. Sedangkan lawannya, yakni "sektor publik", kerap diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.

PM yang berbasis masyarakat seringkali diartikan dengan pelayanan sosial gratis dan swadaya yang biasanya muncul sebagai respon terhadap melebarnya kesenjangan antara menurunnya jumlah pemberi pelayanan dengan meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan pelayanan. PM juga umumnya diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (*empowerment*) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan.

Dengan demikian, PM dapat didefinisikan sebagai metoda yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya (AMA, 1993). Menurut Twelvetreets (1991) PM adalah "the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions." Secara khusus PM berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas,

baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.

Secara teoretis, PM dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan dari dua perspektif yang berlawanan, yakni aliran kiri (sosialis-Marxis) dan kanan (kapitalis-demokratis) dalam spektrum politik. Dewasa ini, terutama dalam konteks menguatnya sistem ekonomi pasar bebas dan "swastanisasi" kesejahteraan sosial, PM semakin menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan, maupun dalam memfasilitasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara garis besar, Twelvetrees (1991) membagi perspektif PM ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan "profesional" dan pendekatan "radikal". Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berpijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya.

Sebagaimana diungkapkan oleh Payne (1995), "This is the type of approach which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation." Seperti digambarkan oleh Tabel 1.1, dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi kedalam beberapa perspektif sesuai dengan beragam jenis dan tingkat praktek PM. Sebagai contoh, pendekatan profesional dapat diberi label sebagai perspektif (yang) tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai perspektif transformasional (Dominelli, 1990; Mayo, 1998).

Berdasarkan perspektif di atas, PM dapat diklasifikasikan kedalam enam model sesuai dengan gugus profesional dan radikal (Dominelli, 1990; Mayo, 1998). Keenam model tersebut meliputi: Perawatan Masyarakat, Pengorganisasian Masyarakat dan Pembangunan Masyarakat pada gugus profesional; dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Sosial, Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender dan Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit) pada gugus radikal (Tabel 1.2).

1. Perawatan Masyarakat merupakan kegiatan volunteer yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.

2. Pengorganisasian Masyarakat memiliki fokus pada perbaikan koordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan Masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah untuk secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Wama Kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Tabel 1.1.
Dua Perspektif Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Tujuan/Asumsi
Profesional (Tradisional, Netral Teknikal)	1. Meningkatkan inisiatif masyarakat, termasuk kemandirian 2. Memperbaiki pemberian pelayanan sosial dalam kerangka relasi sosial yang ada.
Radikal (Transformasional)	1. Meningkatkan inisiatif masyarakat, memperbaiki pemberian pelayanan sosial. 2. Pemberdayaan masyarakat guna mencari akar penyebab ketertindasan dan diskriminasi 3. Mengembangkan strategi dan membangun kerjasama dalam melakukan perubahan sosial sebagai bagian dari upaya mengubah relasi sosial yang menindas, diskriminatif, dan eksploitatif

Sumber : Mayo (1998) dan Suharto (2002)

Tabel 1.2.
Model-Model Pengembangan Masyarakat

Perspektif	Model
Profesional (Tradisional, Netral Teknikal)	Perawatan Masyarakat Pengorganisasian Masyarakat Pembangunan Masyarakat
Radikal (Transformasional)	Aksi Masyarakat Berdasarkan Kelas Aksi Masyarakat Berdasarkan Jender Aksi Masyarakat Berdasarkan Ras (Warna Kulit)

Sumber : Mayo (1998) dan Suharto (2002)

Pelaksanaan PM dapat dilakukan melalui penetapan sebuah program atau proyek pembangunan. Secara garis besar, perencanannya dapat dilakukan dengan mengikuti 6 langkah perencanaan.

1. Perumusan masalah. PM dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa masalah yang biasanya ditangani oleh PM berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pemberantasan

buta huruf, dan lain-lain. Masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian (survey, wawancara, observasi), diskusi kelompok, rapat desa, dan seterusnya.

2. Penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut.
3. Perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Tujuan yang baik memiliki karakteristik jelas dan spesifik sehingga tercermin bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu dan tenaga yang tersedia.
4. Penentuan kelompok sasaran. Kelompok sasaran adalah sejumlah orang yang akan ditingkatkan kualitas hidupnya melalui program yang telah ditetapkan.
5. Identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan, termasuk didalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia.
6. Penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metoda yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan.
7. Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi dan jadwal kegiatan? Apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan? Dengan demikian melalui monitoring dan evaluasi selanjutnya dapat dilihat indikator keberhasilannya.

2.3. Dimensi Dan Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan (misalnya, kurang makan, kurang pendapatan, kurang sehat, kurang dinamis) dan objek pasif penerima pelayanan belaka. Melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan (*kapabilitas*) yang melingkup aras sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun; dan (2) Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis (Suharto, 2003).

2.3.1. Pengertian Pemberdayaan

Pengertian tentang pemberdayaan ada banyak ragamnya, hal tersebut tergantung dari sudut mana orang mengartikan pemberdayaan itu. Beberapa pengertian tentang pemberdayaan dapat disebutkan sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife : 1995).
- b. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial (Swift dan Levin : 1987).
- c. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport : 1984).
- d. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al. :1994).

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, untuk (a) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (b) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Beragam definisi pemberdayaan menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2.3.2. Indikator Pemberdayaan

Agar para pendamping mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan, maka perlu diketahui berbagai indikator yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya atau tidak. Sehingga ketika pendampingan sosial diberikan, segenap upaya dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan (keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan. Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai empowerment index atau indeks pemberdayaan (Girvan, 2004):

- a. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah, ke rumah tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
- b. Kemampuan membeli komoditas 'kecil': kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, sampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat

membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- c. Kemampuan membeli komoditas 'besar': kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, koran, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditemak, memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami, istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tersebut secara sendiri atau terpisah dari pasangannya.

Keberhasilan pemberdayaan keluarga miskin dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis jenis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: 'kekuasaan di dalam' (*power within*), 'kekuasaan untuk' (*power to*), 'kekuasaan atas' (*power over*), dan 'kekuasaan dengan' (*power with*). Tabel 1.3. di bawah ini memperlihatkan.

Tabel 1: Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
Kekuasaan di dalam: Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah	- Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya - Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara - Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat	- Kepercayaan diri dan kebahagiaan - Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara - Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain - Keinginan untuk mengontrol jumlah anak	- Assertiveness dan otonomi - Keinginan untuk menghadapi subordinasi jender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik - Keinginan terlibat dalam proses-proses budaya, hukum dan politik
Kekuasaan untuk: • Meningkatnya kemampuan individu untuk berubah • Meningkatnya kesempatan untuk memperoleh akses	- Akses terhadap pelayanan keuangan mikro - Akses terhadap pendapatan - Akses terhadap aset-aset produktif dan kepemilikan rumah tangga - Akses terhadap pasar - Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak	- Keterampilan, termasuk kemelekakan hurup - Status kesehatan dan gizi - Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi - Ketersediaan pelayanan kesejahteraan publik	- Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah - Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan - Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik dan kebudayaan
Kekuasaan atas: • Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro • Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut	- Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya. - Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya. - Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga. - Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga - Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar.	- Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana. - Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat	- Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat - Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.
Kekuasaan dengan: Meningkatkan solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro	- Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan domestik. - Mampu memberi gaji terhadap orang lain - Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi jender pada konteks ekonomi makro.	- Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga. - Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.	- Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis. - Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat. - Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi jender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.

Sumber : Edi Suharto, 2003

2.4. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Penciptaan Kemandirian Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum memiliki keberdayaan. Menurut Priyono dan Pranarka (1996) pemberdayaan mengandung dua arti, yakni pengertian pertama adalah *to give power or authority*, dan pengertian yang kedua adalah *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/belum berdaya. Sedangkan pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Sumodiningrat (2000) memberikan pendapat yang berbeda dengan yang telah disampaikan oleh Priyono dan Pranarka. Adapun menurut Sumodiningrat pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia. Pemberdayaan dalam tradisi barat diterjemahkan sebagai *empowerment*. *Empowerment* dalam khasanah barat lebih bermuansa "pemberian kekuasaan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Berdasarkan asumsi tersebut istilah yang lebih tepat untuk menjelaskan konsep pemberdayaan adalah "energize" atau "memberi energi". Dengan demikian pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah usaha memberi energi agar yang bersangkutan mampu bergerak secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumber daya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri. Selain itu mereka juga menemukan solusi yang tepat dan mengakses sumber daya yang diperlukan, baik sumber daya eksternal maupun sumber daya milik masyarakat itu sendiri. Pada prinsipnya, masyarakat mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

Pemaparan di atas mengimplikasikan bahwa program Pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau yang tidak berkelanjutan. Kelompok sasaran utama pendekatan ini adalah kelompok-kelompok marjinal dalam masyarakat, termasuk perempuan dan anak-

anak. Namun demikian, ini tidak berarti menafikkan partisipasi pihak-pihak lain dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Oleh karena itu secara langsung, pendekatan ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menemukenali dan memprakarsai kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan menggunakan sumber daya (modal keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka sendiri dengan cara yang berkelanjutan;
2. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan mereka;

Pendekatan pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menemukenali masalah dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. Pendekatan ini akan mempererat hubungan antar anggota masyarakat itu sendiri dan masyarakat lain serta lembaga-lembaga pendukung.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni (1998) mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini, maka pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektifnya dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sulistiyani, 2004).

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan mengarah pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan. Sementara itu kondisi afektif adalah merupakan *sense* yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Sedangkan kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

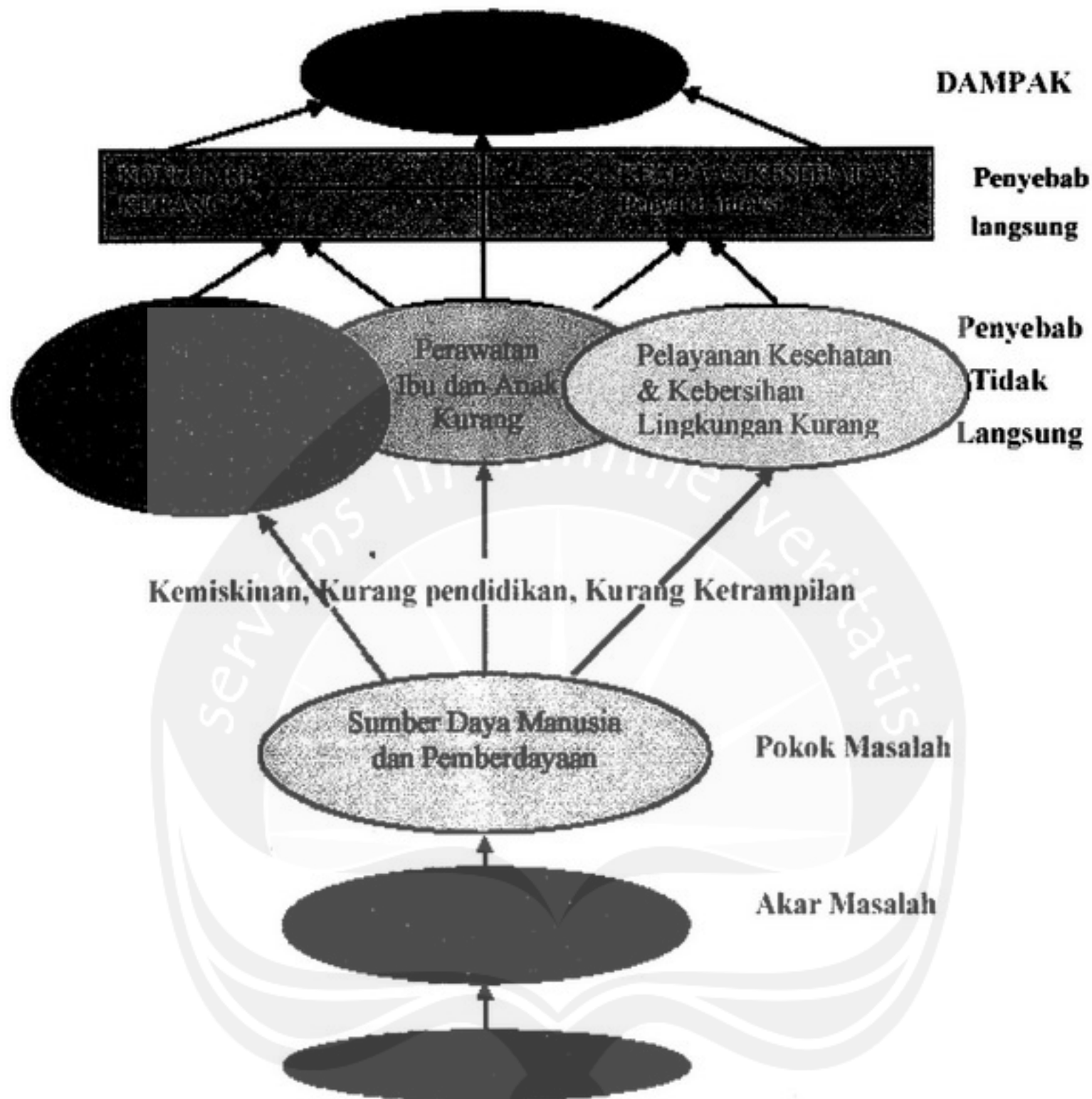
Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, namun terkadang mereka tidak menyadarinya sehingga daya tersebut masih belum dapat diketahui secara eksplisit. Oleh karenanya harus dilakukan upaya motivasi untuk menggali dan mengembangkan daya yang dimiliki masyarakat tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan hendaknya jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), akan tetapi sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian.

Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuannya. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan melalui proses belajar yang berulang-ulang akan diperoleh akumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan pada terwujudnya kemandirian mereka.

2.5. Pemberdayaan Dan Peran Masyarakat Pada Peningkatan Gizi Serta Kesehatan

Dalam rangka membangun sumberdaya manusia maka ada beberapa hal yang sangat mendasar dan tidak dapat ditinggalkan, hal tersebut adalah masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Kita tidak bisa mengatakan punya sumberdaya manusia yang baik bila generasi kita tumbuh terhambat dengan IQ rendah dan kondisi sakit, hal ini menunjukkan ada permasalahan gizi pada generasi kita sebagai akibat dari kemiskinan. UNICEF telah memperkenalkan model konseptual berbagai faktor yang berpengaruh terhadap status gizi, pertumbuhan, perkembangan dan survival anak, model tersebut

telah dipergunakan secara internasional (Engle, Menon & Haddad, 1997; UNICEF, 1998; Purwanti, 2004).



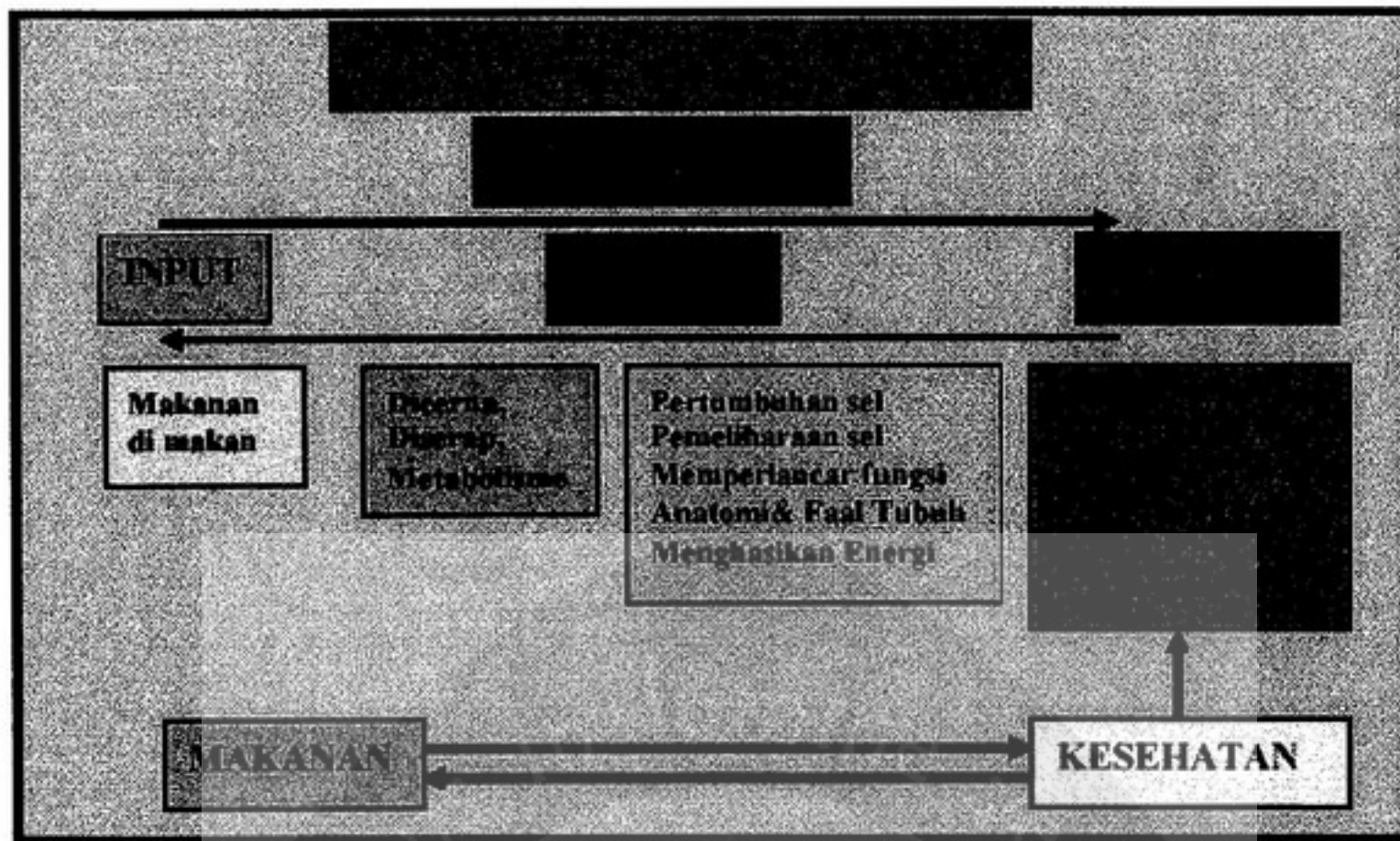
Gambar 1 : Determinasi Masalah Gizi (Purwaningsih, 2004)

Model yang terlihat pada Gambar 1. di atas memperlihatkan tahapan-tahapan penyebab masalah gizi, yaitu penyebab langsung, tidak langsung, pokok masalah, dan akar masalah. Kecukupan pangan rumah tangga, faktor pengasuhan, dan lingkungan kesehatan merupakan tiga faktor penyebab tidak langsung yang menentukan inti zat gizi dan tingkat kesehatan anak, yang selanjutnya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Suatu hal perlu digairisbawahi bahwa sumberdaya, kondisi sosial dan politik merupakan akar masalah dari kemiskinan.

Masyarakat masih banyak yang mengesampingkan pentingnya masalah perkembangan dan pertumbuhan, serta kesehatan anak. Gizi kurang atau malnutrisi yang tidak disadari akan membawa kesakitan individu dan masyarakat bahkan akan menurunkan indeks kualitas hidup bangsa. Kasus keterpurukan bangsa Indonesia yang tiada henti-hentinya akibat krisis ekonomi menyebabkan penurunan indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup (*Human Development Indeks = HDI*) meliputi: a) Ekonomi (GDP/kapita dalam US); b) Kesehatan (Usia Harapan Hidup); c) Pendidikan (tingkat bebas buta aksara pada orang dewasa). Pada tahun 2001 HDI untuk Indonesia adalah 0,682 atau peringkat ke 109 dari 117 negara, dan pada tahun 2002 turun menjadi 0,684 atau peringkat 110 dari 174 negara. Diantara negara-negara ASEAN untuk tahun 2002, peringkat Indonesia tidak jauh dari Vietnam (HDI= 0,688, peringkat 109) dan sedikit lebih baik dari Laos (HDI= 0,485, peringkat 143). Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan China yang penduduknya jauh lebih besar (1,2 milyar), dengan HDI adalah 0,726 peringkat 96 (Sunaryo, 2003).

Salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan adalah dengan melakukan tindakan preventif berupa pencegahan terjadinya penyakit terutama pada anak usia dini serta memberi kecukupan gizi pada anak-anak usia sekolah. Tindakan preventif tersebut dilakukan antara lain dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan melalui pemberian makanan yang bergizi.

Salah satu keberhasilan pembangunan di negara lain misalnya Thailand karena menggunakan status gizi anak sebagai salah satu indikator kemiskinan. Ukuran kemajuan kesejahteraan rakyatnya antara lain dengan menggunakan indikator pertumbuhan berat badan anak. Paradigma pembangunan disana adalah menggunakan paradigma *outcome* berupa pertumbuhan anak dan status gizi. Sedangkan di kita masih menggunakan pangan dan makanan. Tolak ukur pembangunan bisa menggunakan paradigma *outcome*, dalam hal ini kita dapat memisahkan *input* dan *outcome*. Bila masalah gizi merupakan *input* berarti masalah yang ada berupa pangan, makanan (pangan yang diolah), dan dikonsumsi. Sementara masalah gizi yang dianggap sebagai *outcome* maka identifikasi masalah adalah pertumbuhan dan status gizi anak (Soekirman, 2003). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Konsep Gizi Sebagai Input-Outcome (Purwaningsih, 2004)

2.6. Gizi Dan Pembangunan Masyarakat

2.6.1. Pembangunan Gizi Dan Kesehatan

Perkembangan ilmu gizi dan teknologi pangan mengikuti perkembangan masalah yang dihadapi manusia. Dari waktu ke waktu ilmu gizi menghadapi tantangan untuk dapat menentukan jenis dan kecukupan gizi yang optimal untuk mendukung kelangsungan hidup manusia yang aktif, cerdas dan produktif. Dengan tantangan tersebut dan adanya krisis ekonomi yang sampai saat ini masih banyak dirasakan oleh penduduk miskin, maka dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan perlu dilakukan upaya alternatif yakni dengan melakukan pemanataan pertumbuhan anak Balita dan pemberian gizi bagi anak-anak Sekolah Dasar khususnya protein. Adanya tantangan perkembangan ilmu dan tuntutan masyarakat akan pemenuhan zat gizi, maka ilmu gizi semakin bersifat 'interdisiplin' sebagai sains dan aplikasinya dalam pembangunan manusia secara utuh. Dengan demikian untuk memecahkan masalah gizi dan kemiskinan diperlukan ilmu pertanian, teknologi pangan, biokimia, biomolekuler, genetika, fisiologi, toksikologi, epidemiologi serta ilmu sosial dan perilaku (Soekirman, 2000).

2.6.1.1. Masalah Gizi Di Indonesia

Atas dasar pemahaman ilmu gizi yang mendalam, kritis dan jelas serta disampaikan dalam bahasa yang teratur, maka WHO (1948) menyatakan bahwa 'setiap orang memiliki hak untuk menikmati hidup dengan kesehatan yang cukup baik untuk diri dan keluarganya, termasuk cukup makanan yang bergizi dan aman'. Berdasarkan deklarasi tersebut, maka sejak tahun 1950 di Indonesia telah didirikan Lembaga Makanan Rakyat (LMR), dengan slogan yang sangat dikenal yaitu 'empat sehat lima sempurna'. Namun dengan perkembangan ilmu gizi yang sangat pesat dan adanya pengalaman dan hasil penelitian di banyak daerah di Indonesia yang menunjukkan pembangunan gizi masih sangat jauh tertinggal dengan pembangunan ekonomi bidang fisik, maka pedoman gizi Indonesia ditinjau kembali dan berganti menjadi Pedoman Umum Gizi seimbang yang lebih ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara individu maupun masyarakat.

Program gizi, meliputi kegiatan pelayanan dan penyuluhan gizi dan kesehatan, yang berjalan selama ini lebih bersifat *top down* dan sentralistik, dengan peranan pemerintah yang cukup dominan. Pesan-pesan gizi yang merupakan materi penyuluhan bersifat seragam, berlaku untuk semua daerah. Padahal Indonesia terdiri dari berbagai suku dan budaya yang berbeda pola makannya dan berbeda masalah yang dihadapinya. Beberapa pesan menjadi sulit untuk dapat diterima karena tidak sesuai dengan aspek sosio budaya dan keadaan masyarakat setempat (Husaini, 2001).

Ada empat masalah gizi utama di Indonesia, yaitu anemia gizi besi (AGB), Kurang Vitamin A (KVA), Kurang Energi Protein (KEP) dan Gangguan akibat kurang Iodium (GAKI). Semua masalah gizi tersebut penanganannya saat ini masih bersifat terpadu dilakukan di Posyandu, sementara itu Posyandu pada umumnya hanya dipergunakan untuk memantau kesehatan anak-anak balita. Dengan demikian anak-anak SD yang sebenarnya juga masih memerlukan kecukupan protein kadang menjadi terabaikan. Oleh karena itu pemantauan gizi dan kesehatan bagi balita dan anak-anak SD perlu mendapat perhatian, karena merekalah sebagai generasi penerus bangsa yang menjadi tumpuan.

2.6.1.2. Gizi Dan Pembangunan

Laporan Bank Dunia tahun 1992 menyebutkan bahwa gizi yang baik dapat merubah kehidupan anak, meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental serta menjamin status kesehatan anak sehingga anak dapat tumbuh sehat-cerdas-aktif dan produktif. Kebijakan baru Bank Dunia sejak itu (1992) pada hakekatnya memperkuat hasil

penelitian gizi dan kesehatan mengenai adanya hubungan antara gizi-kesehatan-pembangunan ekonomi secara makro.

Salah satu akibat dari krisis ekonomi adalah penurunan daya beli masyarakat termasuk kebutuhan pangan, yang berakibat pada penurunan kecukupan gizi, selanjutnya menurunkan gizi dan status kesehatan masyarakat. Hal ini diantisipasi dengan upaya intervensi gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada keluarga miskin dan yang rawan gizi. Pelayanan perbaikan gizi dilakukan oleh Puskesmas, Pustu, sedangkan PMT dilaksanakan oleh Posyandu atau ibu asuh. Pelaksana teknis dilapang adalah tenaga pelaksana gizi Puskesmas dan bidan desa (Depkes, 1999). Berdasarkan intervensi yang telah dilakukan, nampaknya intervensi perbaikan gizi masih terbatas pada Balita dan Ibu-ibu hamil serta menyusui sedangkan untuk anak-anak SD belumlah banyak diintervensi. Untuk itu intervensi perbaikan gizi bagi anak-anak SD sangatlah dibutuhkan guna meningkatkan kualitas kecerdasannya.

Akhir-akhir ini partisipasi masyarakat dirasakan menjadi sangat penting karena disadari terdapat keterbatasan kemampuan pemerintah sehingga hasil-hasil program gizi lebih sulit dirasakan masyarakat luas. Oleh sebab itu Departemen Kesehatan sendiri perlu merinci cara yang efektif untuk merangsang, mendorong dan meningkatkan partisipasi tersebut. Padahal telah disadari bahwa keberhasilan program terutama terletak pada peran serta seluruh masyarakat, sehingga potensi-potensi yang ada, baik yang kelihatan maupun yang laten dapat digali agar dicapai hasil yang optimal (Trihono, 1999).

Untuk meningkatkan efektivitas kegiatan program, pada saat sekarang perlu disiapkan rencana kegiatan program penyuluhan gizi-kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan informasi yang dirasakan masyarakat. Proses dapat dimulai dengan mengenali kebutuhan masyarakat di bidang gizi (topik-topik yang diinginkan untuk disuluhkan), menggali kekuatan yang ada dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan. Hal ini berbeda dengan kebijakan pemerintah yang pada umumnya menggunakan pola berdasarkan kebutuhan sasaran (*objective needs*), yaitu kegiatan yang direncanakan dibuat berdasarkan ide si pembuat kebijaksanaan.

Dengan demikian pembangunan gizi harus mengupayakan program perbaikan gizi langsung kepada kelompok sasaran yaitu penduduk miskin. Upaya tersebut menurut Soekirman (2000) berupa pelayanan dasar gizi, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan upaya tidak langsung berupa :

- ❑ Jaminan ketahanan pangan sehingga setiap keluarga dan penduduk miskin dapat memperoleh makanan yang cukup bergizi
- ❑ Memperluas kesempatan kerja untuk meningkatkan daya beli
- ❑ Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah untuk penduduk miskin.

Disamping itu masih perlu upaya lain yang bersifat pemantauan pertumbuhan anak Balita dan status kesehatan ibu dan anak (KIA) di Posyandu serta pemenuhan gizi bagi anak-anak SD. Untuk program peningkatan gizi bagi anak-anak SD melalui upaya "babonisasi" sangat penting sehingga perlu mendapat dukungan semua pihak.

2.6.1.3. Kebijakan Pangan, Gizi Dan Kesehatan

Dibidang konsumsi pangan dan gizi strategi untuk mencapai konsumsi pangan penduduk yang beraneka ragam dapat ditempuh melalui pembinaan konsumsi pangan menuju ke pangan seimbang mengacu pada PPH. Seimbang disini artinya seimbang antara zat gizi yang dikonsumsi dengan yang dibutuhkan, seimbang dalam komposisi dan proporsi antar beragam jenis pangan, dan seimbang dalam hal apresiasi nilai sosial budaya terhadap pangan. Penerapan strategi ini dapat ditempuh melalui :

- ❑ Penyediaan pangan beragam yang memenuhi kebutuhan penduduk, mencakup jumlah dan mutunya (termasuk keamanannya)
- ❑ Peningkatan pendapatan rumah tangga dengan cara mengembangkan ketrampilan kerja, lapangan kerja, dan kesempatan berusaha
- ❑ Peningkatan kesadaran pangan dan gizi melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) pangan dan gizi
- ❑ Pembinaan kebiasaan makan makanan seimbang melalui jalur formal dan informal secara dini.

Paradigma sehat menuju Indonesia sehat 2010 menuntut pembangunan gizi dan kesehatan juga memiliki visi dan misi untuk mencegah terjadinya gizi buruk dan menangani serta menyembuhkan penderita gizi buruk dan kurang gizi untuk segera sehat. Oleh karena itu diperlukan pedoman gizi seimbang yang lengkap dengan komponen pendidikan gizi di masyarakat. Pada Repelita VI Bab 11 Bidang Pangan dan Perbaikan Gizi telah disebutkan bahwa 'Kebijakan untuk meningkatkan diversifikasi konsumsi pangan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola pangan yang beraneka ragam untuk meningkatkan mutu gizinya. Pola konsumsi pangan didorong untuk sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang (PUGS)'.

2.6.2. Krisis Ekonomi Dan Keadaan Gizi Penduduk

2.6.2.1. Kemiskinan Dan Gizi Buruk

Pendapatan sebagian besar keluarga di Indonesia dibelanjakan untuk makanan sehari-hari, maka perlu pengendalian uang sedemikian rupa, sehingga kebutuhan zat gizi dapat dipenuhi dengan biaya yang seminim mungkin. Pengendalian ini dapat berupa : (a) menyesuaikan daya beli keluarga dengan harga pasar, (b) menyesuaikan menu sehari-hari dengan bahan yang murah tapi sehat, (c) menyimpan bahan makanan secara tepat, (d) mengolah dan menyajikan makanan dengan baik, (e) menganeka ragamkan menu setiap hari agar tidak bosan.

Menurut Mubyarto (2000), bahwa apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bersumber dari agribisnis atau industri lain yang berskala besar dan upaya pemerataan tidak efektif maka hasil industri tersebut tidak menetes ke masyarakat yang kurang gizi. Dimana tidak ada keadilan dan pemerataan, maka masalah kurang gizi akan makin meningkat. Sementara itu laporan ADB *Nutrition and Development* tahun 2001 menunjukkan bahwa meskipun perbaikan ekonomi merupakan syarat penting untuk perbaikan gizi, tetapi hal itu tidak cukup. Sehingga perlu perbaikan dari pembangunan yang responsif gender dan anak, peningkatan taraf pendidikan masyarakat, penurunan prevalensi kurang gizi dan penyakit infeksi, perbaikan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, Posyandu maupun Polindes.

2.6.2.2. Upaya Penanganan Gizi Buruk Dan Generasi Yang'Hilang'

Anak balita dan anak-anak SD yang memiliki status gizi buruk berisiko tinggi kehilangan sebagian potensinya untuk menjadi pekerja yang profesional karena rendahnya kemampuan intelektual anak. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan mengakibatkan banyaknya buruh dan karyawan yang kehilangan pekerjaannya, menyebabkan turunnya daya beli pangan dan kesehatan keluarga. Akibatnya jutaan anak Indonesia kekurangan gizi dan tumbuh dengan kemampuan intelektual yang rendah. Akibat selanjutnya mereka tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan hal ini sering disebut dengan generasi yang hilang yaitu generasi dengan daya intelektual yang rendah (Tandyo, 1999).

Sesuai dengan hukum Bennet, bahwa penurunan kualitas konsumsi pangan rumah tangga yang ditandai dengan keterbatasan membeli sumber makan protein hewani dan buah dapat berdampak buruk pada status gizi anak dan perempuan. Oleh karena itu menurut Soekirman (2000) jaring pengaman sosial bidang kesehatan (JPS-BK) yang memberikan subsidi kepada keluarga miskin dengan bantuan pengobatan di

Puskesmas, bantuan makanan pendamping ASI (MP-ASI) bagi balita dan bantuan uang untuk makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil serta menggiatkan kembali fusi (revitalisasi) Posyandu. Di bidang pendidikan diberikan bantuan bea siswa untuk anak sekolah keluarga miskin dan PMT anak sekolah (PMT-AS) yang telah dimulai sejak tahun 1996 dilanjutkan sebagai bagian dari JPS.

2.7. "Babonisasi" Sebagai Upaya Pemenuhan Gizi Masyarakat

Lima tahun terakhir ini media massa kerap mengangkat berita tentang kelaparan dan kurang gizi. Berita di *Koran Tempo* (8/8/2001), misalnya, melaporkan ratusan anak di bawah lima tahun (balita) di Bogor menderita gizi buruk. Disusul Tajuk Rencana: *Kasus Rawan Gizi Tidak Bisa Dianggap Enteng* (*Kompas*, 18/4/2002) untuk merespons berita ditemukannya 317 bayi di bawah usia tiga tahun di Bogor kekurangan gizi. Berita di *Suara Pembaruan* (13/9/2001) tak kalah mengesankan yakni *lebih dari 35 persen siswa sekolah dasar di DKI mengidap anemia*. Padahal jika dilihat telah banyak program pemenuhan gizi dan kesehatan yang diperuntukkan bagi anak-anak, program tersebut diantaranya adalah Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMT-AS) guna mengontrol tingkat kecerdasan anak SD/MI.

2.7.1. Gizi Anak Sekolah Dan Peningkatan Sumber Daya Manusia

Tak bisa dimungkiri, kualitas sumber daya manusia (SDM) memainkan peran penting dalam pembangunan bangsa. Perkembangan ilmu dan pengetahuan (iptek) yang kini berlangsung amat cepat dan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa, membutuhkan SDM berkualitas tinggi. Seiring dengan itu peningkatan derajat kesehatan yang didukung status gizi yang baik menjadi investasi SDM guna membangun keunggulan kompetitif itu.

Menyadari tantangan ini, sebenarnya sejak tahun 1996 pemerintah telah menggulirkan program PMT-AS sebagai wujud perbaikan gizi anak SD/MI. Dengan program ini, tampak pemerintah sungguh-sungguh memikirkan betapa penting manfaat gizi bagi peningkatan prestasi belajar anak usia sekolah yang amat membutuhkan pasokan makanan bergizi untuk mengontrol kecerdasannya.

Namun pada kenyataannya, program seperti PMT-AS ini belum menunjukkan hasil signifikan. Makanan pendukung program PMT-AS, yang seharusnya mengandung 300 kalori energi, lima gram protein, sejumlah vitamin (khususnya vitamin A), dan mineral (terutama zat besi) belum mampu mengontrol status gizi anak sekolah. Hasil penelitian Yayasan Kusuma Buana tahun 2000 (Sibuea : 2002) memperlihatkan

fenomena itu. Murid SD Pisangan Baru 05 Jakarta Timur, memiliki prevalensi anemia tinggi di antara siswanya, 69,1 persen. Artinya, hampir tujuh di antara 10 siswa mengalami anemia gizi besi (*Kompas*, 1/2/ 2001). Persentase ini meningkat bila dibanding kondisi enam tahun lalu, prevalensi anemia nasional di kalangan anak usia sekolah (6-10 tahun) adalah 47,2 persen, sedang anak usia 10-14 tahun 51, 5 persen (BPS, 1996).

2.7.2. Kandungan Gizi Program PMT-AS Yang Dikonsumsi Anak-Anak SD

Konon, tingginya angka putus sekolah murid SD di Indonesia diduga karena kekurangan gizi, sebab mereka hampir tidak pernah sarapan pagi. Kondisi ini akan menurunkan kadar gula darah sehingga dropping energi berkurang untuk kerja otak. Untuk mempertahankan kadar gula darah normal, tubuh memecah simpanan glikogen. Bila stok ini habis, tubuh akan kesulitan memasok jatah energi dari gula darah ke otak, yang akhirnya mengakibatkan badan gemetar, cepat lelah dan gairah belajar pun menurun.

Penelitian tentang efektivitas PMT-AS memperbaiki status gizi di sebuah SD Negeri di Medan pernah dilakukan oleh (Sibuea, 2002). Hasilnya, siswa yang tidak pernah sarapan pagi 57,50 persen. Fenomena ini berpengaruh pada status gizi. Temyata mereka yang mengalami status gizi kurang kalori, kurang protein, kurang zat besi, dan kurang vitamin A, prevalensinya amat tinggi, masing-masing 50 persen, 55 persen, 25 persen, dan 40 persen. Sementara itu, status gizi kurang yang dihitung berdasar berat badan, prevalensinya lebih tinggi lagi, 62,5 persen.

Besarnya angka prevalensi status gizi kurang ini tidak berbeda dengan kondisi yang terjadi secara umum di Indonesia. Hasil survei gizi yang dilakukan di beberapa daerah di Pulau Jawa menunjukkan, konsumsi kalori, protein, zat besi, dan vitamin A, umumnya rendah dibanding kecukupan gizi yang disarankan Widya Karya Pangan dan Gizi 1998 terutama pada golongan rawan biologis dan rawan pangan.

Tingginya prevalensi kurang gizi pada anak usia SD berkorelasi dengan jenis makanan pendukung PMT-AS. Hasil penelitian menunjukkan jenis makanan kudapan pendukung PMT-AS didominasi produk olahan nabati. Meski ada bahan yang digunakan berasal dari hewani dan ikan seperti daging, susu, telur, mentega, dan udang, pada jenis makanan yang dikonsumsi namun jumlahnya relatif kecil. Ini menyebabkan rata-rata kandungan protein dalam menu PMT-AS hanya 3,76 gram. Demikian juga kandungan energinya, diperoleh rata-rata 228,14 kalori. Padahal, agar dapat diterima sebagai makanan kudapan pendukung program PMT-AS, produk itu harus mengandung

lima gram protein, 300 kalori energi, dan sejumlah vitamin (terutama vitamin A), dan zat besi (Sibuea, 2002).

Kenyataan ini menunjukkan, makanan pendukung PMT-AS belum efektif untuk mengontrol kecerdasan anak sekolah. Kualitas PMT-AS, dari aspek ketersediaan protein, baru mencapai 75,20 persen, sedangkan dari aspek ketersediaan energi baru mencapai 76,04 persen. Fenomena ini menjadi suatu ironi makanan tambahan yang selama ini diharapkan sebagai "paspor" anak sekolah menuju masa depan, ternyata belum memenuhi syarat gizi minimal.

2.7.3. Perlu Mengkaji Ulang Program PMT-AS

Pemberian PMT-AS seperti yang telah disebutkan di atas nampaknya masih dirasa kurang efektif untuk pemenuhan gizi anak-anak SD. Hal ini disebabkan apakah hanya dengan memberikan makanan tambahan selama 108 hari makan anak pertahun, makanan kudapan pendukung PMT-AS yang nilai gizinya kurang dari 300 kalori dan proteinnya kurang dari lima gram masalah kurang gizi siswa SD bisa tertanggulangi? Bila PMT-AS hanya sekadar membagi-bagi makanan kepada anak sekolah, program ini masih berorientasi proyek dan tidak memperhitungkan kesinambungan program, sehingga saat murid SD/MI peserta PMT-AS tidak lagi mendapat makanan tambahan, status gizinya akan kembali rendah. Ini berarti, perlu dikaji ulang penyelenggaraan PMT-AS, apakah masih berdaya ungkit besar untuk mendongkrak status gizi anak SD dan MI?

Jika tujuannya untuk memampukan tiap keluarga mendapatkan makanan bergizi secara berkesinambungan, paradigmanya harus diubah. Program PMT-AS, tidak lagi sekadar membagi-bagi makanan yang nilai gizinya tak cukup, tetapi dalam pelaksanaannya selain difokuskan pada bantuan makanan bergizi yang bisa dinikmati anak sekolah, juga dilakukan pemberdayaan masyarakat lewat penyuluhan gizi kepada keluarga murid peserta PMT-AS. Tanpa penyuluhan gizi secara intensif sulit diharapkan perubahan perilaku dan pola makan masyarakat untuk menjamin kecukupan gizi pada anak sekolah.

Untuk tidak menyebut program PMT-AS gagal dalam meningkatkan status gizi siswa SD, terlepas dari mahalnnya biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut, paling tidak dapat disebutkan ada tiga hal berikut yang menjadi kendala utama dalam penyelenggaraannya.

Pertama, dana Rp 475 untuk tiap kali pemberian makanan tambahan bagi setiap murid peserta PMT-AS, jelas tidak cukup untuk memperbaiki status gizi anak sekolah.

Kedua, bantuan dana PMT-AS tidak dipakai secara tepat, dana itu dipakai oleh sekolah-sekolah yang menampung kebanyakan anak tidak beruntung, tetapi ternyata tidak dipakai bagi anak-anak miskin itu sendiri. Ketiga, atmosfer yang tidak kondusif untuk mewujudkan keadilan dalam setiap ranah kehidupan.

Ketiga hal itu menjadi faktor utama ketumpulan PMT-AS, harus dijumpai dengan komitmen bersama dan *good will* pemerintah yang menempatkan gizi dalam arus utama (*mainstream*) dalam semua sektor pembangunan. Alan Berg (Sibuea, 2002) dalam *Peranan Gizi dalam Pembangunan Nasional* mengatakan, program perbaikan gizi anak sekolah harus dilihat sebagai investasi SDM. Setiap dollar yang digunakan untuk perbaikan gizi anak sekolah akan memberi keuntungan puluhan dollar, sebab angka *drop out* sekolah yang amat merugikan dapat dicegah.

2.7.4. Program “Babonisasi” Sebagai Terobosan Untuk Pemenuhan Gizi Anak SD

Alternatif lainnya yang dapat ditempuh untuk memenuhi gizi anak SD adalah dengan memberikan protein yang cukup bagi anak-anak SD. Hal tersebut telah dilakukan oleh Bupati Bantul dengan program “babonisasi” sejak tahun 2003, yakni dengan memberikan bantuan ayam babon yang diperuntukkan bagi anak-anak SD yang bersekolah di Bantul.

Ada pro dan kontra dari pelaksanaan program “babonisasi” yang telah dilaksanakan, namun demikian berbagai lapisan elemen masyarakat di kabupaten Bantul banyak yang menilai program “babonisasi” sangat bermanfaat sehingga perlu diteruskan. Untuk itu mereka mendesak pada tahun anggaran 2005 program pemberian bantuan kepada siswa SD sebanyak 3 ekor babon persiswa tersebut tetap direalisasikan kembali, sebab selain manfaat yang besar “babonisasi” juga memberikan manfaat yang tak ternilai harganya yakni penyadaran keluarga mengenai penyiapan generasi yang lebih berkualitas.

Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2003 program babonisasi sebagai salah satu program terobosan Pemkab Bantul dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan program pendidikan pada umumnya telah dilaksanakan. Disamping telah mendapatkan sambutan yang baik dari sebagian besar masyarakat program tersebut juga dikritik secara tajam. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2004 sementara meniadakan program tersebut dengan berbagai pertimbangan.

Sebagian besar masyarakat merasakan manfaat besar dari program “babonisasi”, karena dengan program tersebut dapat meningkatkan gizi keluarga,

mendidik anak bertanggung jawab dan melatih mandiri, menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak, menunjang program makan telur dan meningkatkan pendapatan keluarga.

Penerimaan masyarakat terhadap program "babonisasi" juga ditunjukkan dengan tidak saja mereka hanya sekedar meminta tetapi juga memberi masukan terhadap kendala kematian ayam dan mengusulkan solusi supaya Bupati menyediakan tenaga teknis pendamping yang diambil dari penerima babon yang dilatih dan dibimbing instansi terkait. Selain itu, agar ayam bisa hidup sehat dan berkembang diadakan lokalisasi kandang serta sosialisasi teknis pemeliharaan ayam kepada keluarga. Dengan demikian, tidak ada alasan orang lain curiga terhadap program "babonisasi", karena semua terkontrol dengan baik



BAB III

MASALAH, TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Masalah Penelitian :

Pembangunan untuk masyarakat miskin setelah krisis multi dimensi di Indonesia dirasa sangat kurang, hal ini terlihat dari kondisi pada anak dan ibu. Pada tahun 1989 - 1995 permasalahan gizi pada anak umur dibawah dua tahun turun dan saat terjadi krisis tahun 1998 sampai 2000 permasalahan gizi pada anak bawah dua tahun naik kembali. Hal ini terjadi karena yang paling menderita karena kurang pangan/ kemiskinan dengan terjadinya krisis adalah pada anak dibawah dua tahun dan ibu.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 pasal 28 ayat (1) dan Undang-undang nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sekaligus investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pendidikan, serta berperan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, pembangunan kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah wajib memenuhi hak-hak anak, yaitu tentang kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Seluruh komponen bangsa (pemerintah, legislatif, swasta dan masyarakat) bertanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak tersebut. Di bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal sejak dalam kandungan.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kecerdasan anak-anak Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul, maka dicanangkanlah program "Babonisasi" yang menjadi unggulan Kabupaten Bantul pada tahun 2003. Dalam pelaksanaan sebuah program tentunya ada pro dan kontra, untuk itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : sejauhmana program "Babonisasi" yang menjadi program unggulan Kabupaten Bantul dapat terealisasi dan berorientasi pada

pemberdayaan masyarakat sekitar? Faktor pendukung dan penghambat apa yang menyebabkan program tersebut berhasil atau kurang berhasil?

3.2. Tujuan Penelitian :

Ada beberapa tujuan penelitian yang ingin diungkap dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Mengetahui sampai sejauhmana akseptabilitas masyarakat terhadap pelaksanaan program "Babonisasi" di Kabupaten Bantul?
2. Mengetahui sejauhmana keberhasilan program "Babonisasi" yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul tersebut?
3. Mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program "Babonisasi" yang telah berlangsung?
4. Mengetahui apakah program "Babonisasi" telah dapat menjadi indikator pemberdayaan masyarakat setempat?

3.3. Manfaat Penelitian :

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai dua jenis kemanfaatan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah manfaat dari segi teoritis dan yang kedua adalah manfaat dari segi praktis. Manfaat dari segi teoritis dimaksudkan sebagai upaya pengembangan pada bidang ilmiah, sementara itu manfaat dari segi praktis berorientasi pada pemberian masukan bagi para pengambil kebijakan di dalam melakukan perencanaan dan pengimplementasian program ataupun kegiatan yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut.

Kedua manfaat penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menambah literatur dan bahan bacaan mengenai kajian yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, di samping itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi penelitian yang telah ada.
2. Secara praktis, dapat memberikan masukan kepada pengambil kebijakan di tingkat regional maupun nasional pada umumnya serta pemerintah daerah setempat pada khususnya, terkait dengan pelaksanaan program "babonisasi" yang menjadi andalan mereka. Dengan demikian diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan solusi pemecahan masalah yang lebih efektif dalam program yang dimaksud.

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Obyek Kajian dan Lokasi Penelitian

Unit analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah rumah tangga, dan obyek penelitian yang dipilih adalah murid-murid Sekolah Dasar penerima bantuan program "Babonisasi" yang berdomisili di Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. Berdasarkan topik penelitian ini maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Kecamatan Srandakan, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Kecamatan Srandakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bantul yang menjadi sasaran dari pelaksanaan program "Babonisasi" tersebut.

4.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Sekolah Dasar yang masih terdaftar di SD Negeri Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan target dari pelaksanaan program "Babonisasi". Sampel yang akan diambil adalah sebanyak 10 % dari total jumlah populasi yang memiliki kriteria seperti tersebut di atas. Adapun teknik pengambilan sampel akan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive random sampling*.

4.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Data primer yakni : data dan informasi utama yang digali dalam penelitian dan diperoleh dari responden.
2. Data sekunder, yakni sesuai dengan sifatnya merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah tersedia.

Data primer diperoleh dengan cara melakukan :

- 1.1. Wawancara berstruktur, dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden.
- 1.2. *Indepth interview* (wawancara mendalam), hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar informasi yang diperoleh lebih memberikan wawasan yang mendalam. *Indepth interview* ini dilakukan pada beberapa responden terpilih, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai dampak dan intensitas pelaksanaan program "Babonisasi". Untuk data sekunder, dipergunakan teknik pengambilan

data dokumentasi dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dipergunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari lapangan.

4.4. Teknik Analisa Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Untuk memproses data ini akan digunakan alat analisis statistik, karena salah satu fungsi statistik adalah menyederhanakan, mengolah, dan menganalisis data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan penggabungan dari analisis kuantitatif dan kualitatif, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melengkapi satu dengan yang lainnya.

Analisa kuantitatif dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh hasil berupa persentase dan kecenderungan dari penelitian ini. Adapun untuk analisa kuantitatif dipergunakan analisis statistik deskriptif (univariat dan bivariat) yaitu :

1. Distribusi frekuensi yang dipergunakan sebagai dasar lebih lanjut.
2. Tabulasi silang (*cross tabulation*)

Sedangkan analisa kualitatif dipergunakan untuk memberikan penjelasan dalam menafsirkan hasil angka-angka yang diperoleh dan mendeskripsikan temuan-temuan 'unik' dan spesifik yang diperoleh dari hasil penelitian ini dan tidak dapat diberi konotasi angka.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Daerah Penelitian

5.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

5.1.1.1. Kepadatan Penduduk Geografis

Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Kepadatan Penduduk Geografis di Kabupaten Bantul tahun 2002 dan 2004 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Kepadatan penduduk geografis per kecamatan di Kabupaten Bantul
tahun 2002 dan 2004

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah		Kepadatan/Km2	
			2002	2004	2002	2004
1.	Srandakan	18,340	29,203	29,271	1.592	1.002
2.	Sanden	23,270	33,935	34,087	1.458	1.004
3.	Kretek	25,500	30,703	31,060	1.204	1.012
4.	Pundong	23,760	32,877	33,054	1.384	1.005
5.	Bambang Lipuro	22,820	42,586	42,968	1.866	1.009
6.	Pandak	24,290	48,155	48,440	1.983	1.006
7.	Bantul	33,190	57,580	58,473	1.735	1.016
8.	Jetis	21,990	49,081	49,802	2.232	1.015
9.	Imogiri	25,600	56,226	56,684	2.196	1.008
10.	Dlingo	57,810	36,373	36,796	0.629	1.012
11.	Pleret	56,340	33,980	34,263	0.603	1.008
12.	Piyungan	21,280	37,656	38,081	1.770	1.011
13.	Banguntapan	33,120	76,162	77,207	2.300	1.014
14.	Sewon	26,290	75,231	76,436	2.862	1.016
15.	Kasihan	26,760	77,100	78,514	2.881	1.018
16.	Pajangan	32,380	29,941	30,271	0.925	1.011
17.	Sedayu	34,110	42,996	43,804	1.261	1.019
Jumlah		506,850	789,785	799,211	1.699	1.011

Sumber : BPS Kab. Bantul

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penyebaran penduduk tidak merata. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di Kecamatan Sewon, Banguntapan, dan Bantul, sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Imogiri. Daerah yang mempunyai kepadatan penduduk tinggi berarti mempunyai kuantitas Sumber Daya Manusia yang tinggi, akan tetapi apabila tidak diikuti dengan penambahan lapangan kerja maka dimungkinkan terjadinya peningkatan jumlah pengangguran.

5.1.1.2. Kepadatan Penduduk Agraris

Kepadatan penduduk agraris adalah angka yang menunjukkan perbandingan jumlah penduduk pada suatu daerah dengan luas lahan pertanian yang tersedia. Kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Bantul secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.
Kepadatan penduduk agraris per kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Luas Areal		Jumlah Penduduk		Kepadatan/Km2	
		2002	2004	2002	2004	2002	2004
1.	Srandakan	421	421	29,203	29,271	69.366	69.527
2.	Sanden	991	991	33,935	34,087	34.243	34.397
3.	Kretek	892	891	30,703	31,060	34.420	34.828
4.	Pundong	881	881	32,877	33,054	37.318	37.519
5.	Bambang Lipuro	1,165	1,164.14	42,586	42,968	36.555	36.910
6.	Pandak	936	935.87	48,155	48,440	51.448	51.759
7.	Bantul	1,147	1,145.88	57,580	58,473	50.201	51.029
8.	Jetis	1,245	1,244.68	49,081	49,802	39.422	40.012
9.	Imogiri	1,181	1,180.89	56,226	56,684	47.609	48.001
10.	Dlingo	513	513	36,373	36,796	70.903	71.727
11.	Pleret	872	871.21	33,980	34,263	38.968	39.328
12.	Piyungan	1,417	1,416.15	37,656	38,081	26.574	26.891
13.	Banguntapan	1,466	1,458.47	76,162	77,207	51.952	52.937
14.	Sewon	1,372	1,366.44	75,231	76,436	54.833	55.938
15.	Kasihan	707	702.61	77,100	78,514	109.052	111.746
16.	Pajangan	263	262.95	29,941	30,271	113.844	115.121
17.	Sedayu	1,023	1,022.74	42,996	43,804	42.029	42.830
Jumlah		16,492	16,4698	789,785	799,211	53.455	54.147

Sumber : BPS Kab. Bantul

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa telah terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 22 Ha yang berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian. Dengan melihat kecenderungan bahwa setiap tahun terjadi pengurangan lahan pertanian, maka perlu ada upaya-upaya kongkrit agar pemenuhan kebutuhan dari produk pertanian tetap terjaga serta adanya langkah-langkah pengamanan lahan pertanian untuk menekan laju pengurangannya.

5.1.1.3. Kepadatan Penduduk Daerah Terbangun

Kepadatan penduduk daerah terbangun adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas daerah terbangun dalam suatu wilayah tertentu. Kondisi demikian menggambarkan bahwa apabila suatu wilayah tertentu mempunyai kepadatan daerah terbangun tinggi akan menunjukkan padatnya permukiman di wilayah tersebut. Daerah terbangun dalam hal ini dapat merupakan perkampungan atau pemukiman, termasuk lapangan, kuburan dan sekolahan yang dapat muncul bersamaan maupun

sebagian dalam suatu tempat. Lebih lanjut secara lebih rinci kepadatan penduduk daerah terbangun dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Kepadatan penduduk agraris per kecamatan di Kabupaten Bantul

No.	Kecamatan	Luas Daerah Terbangun (Ha)		Jumlah Penduduk		Kepadatan (Jiwa/Ha)	
		2002	2004	2002	2004	2002	2004
1.	Srandakan	1250	1463	29,203	29,271	23.36	20.01
2.	Sanden	1022	2244	33,935	34,087	33.20	15.19
3.	Kretek	1438	1890	30,703	31,060	21.35	16.43
4.	Pundong	1016	1918	32,877	33,054	32.36	17.23
5.	Bambang Lipuro	1061	1800	42,586	42,968	40.14	23.87
6.	Pandak	1445	1993	48,155	48,440	33.33	24.31
7.	Bantul	1044	1039	57,580	58,473	55.15	56.28
8.	Jetis	1083	2242	49,081	49,802	45.32	22.21
9.	Imogiri	2157	2287	56,226	56,684	26.07	24.79
10.	Dlingo	1610	1062	36,373	36,796	22.59	34.65
11.	Pleret	2442	2284	33,980	34,263	13.91	15.00
12.	Piyungan	1940	1122	37,656	38,081	19.41	33.94
13.	Banguntapan	1336	1818	76,162	77,207	57.01	42.47
14.	Sewon	1331	1913	75,231	76,436	56.52	39.96
15.	Kasihan	2307	1485	77,100	78,514	33.42	52.87
16.	Pajangan	2353	2311	29,941	30,271	12.72	13.10
17.	Sedayu	2077	1214	42,996	43,804	20.70	36.08
Jumlah		26,912	30,085	789,785	799,211	32.15	28.73

Sumber : BPS dan BPN Kab. Bantul

Berdasarkan tabel tersebut maka apabila kepadatan penduduk daerah terbangun tinggi berarti persediaan lahan untuk pembangunan relatif sempit. Daerah yang mempunyai persediaan lahan relatif sempit untuk pembangunan di antaranya adalah Kecamatan Bantul, Jetis, Banguntapan, dan Sewon.

5.1.1.4. Kepadatan Penduduk Kelompok Umur

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan penyebaran penduduk berdasarkan kelompok umur dan tingkat kepadatannya di suatu daerah. Kepadatan penduduk kelompok umur di Kabupaten Bantul secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Umur Tahun 2004

No	Kecamatan	GOLONGAN UMUR									Jumlah
		0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 thn ke atas	
1	Bambanglipuro	3,671	4,283	4,234	4,363	3,471	3,623	2,922	2,438	14,076	43,081
2	Banguntapan	5,544	6,024	9,303	9,201	6,606	7,832	6,385	6,236	21,507	78,638
3	Bantul	4,119	4,429	4,674	5,545	4,739	4,670	5,184	5,284	20,080	58,624
4	Dlingo	3,099	3,122	3,056	2,891	2,851	3,989	2,973	2,650	12,292	36,923
5	Imogiri	4,244	4,409	4,802	5,649	4,460	14,494	4,663	4,510	9,611	56,842
6	Jetis	4,250	4,401	3,599	4,028	5,010	3,731	2,735	2,481	19,587	49,822
7	Kasihan	6,229	6,479	6,201	8,520	8,934	7,221	6,823	6,300	22,096	78,803
8	Kretek	1,890	2,623	3,226	3,105	3,311	2,287	2,104	1,939	10,463	30,948
9	Pajangan	2,476	3,252	3,428	2,856	2,548	2,681	2,291	1,859	8,925	30,316
10	Pandak	3,458	3,651	3,795	4,324	4,468	3,555	3,987	3,795	19,013	50,046
11	Piyungan	4,468	5,060	4,949	4,105	3,336	2,471	2,001	2,039	10,766	39,195
12	Pleret	2,840	2,798	4,216	4,071	3,343	3,037	2,607	3,153	8,242	34,307
13	Pundong	1,954	2,359	2,443	2,577	3,070	3,363	2,944	2,640	11,736	33,086
14	Sanden	2,250	3,142	3,603	3,446	2,701	3,551	2,240	2,070	12,106	35,109
15	Sedayu	3,196	3,438	3,376	4,172	4,769	3,535	3,649	3,376	14,507	44,018
16	Sewon	5,853	5,706	5,907	8,448	9,194	6,867	6,584	6,144	22,040	76,743
17	Srandakan	2,179	2,360	2,523	2,943	2,222	2,102	2,433	2,373	10,903	30,038
Jumlah		61,720	67,536	73,335	80,244	75,033	79,009	62,525	59,187	247,950	806,539

Sumber : BPS dan Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul

5.1.1.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Adapun tabel yang dimaksud adalah tabel 5.5. dan tabel tersebut memuat data penduduk berdasarkan jenis kelamin untuk tahun 2002 dan 2004. Hal ini dilakukan untuk dapat melihat perbandingan jumlah penduduk yang ada di kedua tahun yang disebutkan. Perbandingan antara kurun waktu dua tahun dapat pula dipergunakan untuk menghitung proyeksi kependudukan di masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya mengenai data kependudukan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat secara lengkap pada sajian tabel di bawah.

Tabel 5.5.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kab. Bantul per Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2002			Jumlah Penduduk Tahun 2004		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	Srandakan	14.019	15.054	29.073	14,135	15,107	29,242
2.	Sanden	16.392	17.469	33.861	16,461	17,534	33,995
3.	Kretek	14.730	15.817	30.547	14,917	16,029	30,946
4.	Pundong	15.849	16.968	32.817	15,942	17,069	33,011
5.	Bambang Lipuro	20.337	21.996	42.333	20,595	22,237	42,832
6.	Pandak	23.545	24.242	47.787	23,858	24,495	48,353
7.	Bantul	27.879	29.125	57.004	28,469	29,738	58,207
8.	Jetis	23.514	25.127	48.641	24,011	25,570	49,581
9.	Imogiri	27.128	28.882	56.010	27,400	29,162	56,562
10.	Dlingo	17.639	18.443	36.082	17,826	18,872	36,698
11.	Pleret	16.658	17.095	33.753	16,894	17,239	34,133
12.	Piyungan	18.308	19.092	37.400	18,602	19,337	37,939
13.	Banguntapan	36.893	37.879	74.772	38,271	39,252	77,523
14.	Sewon	37.406	37.155	74.561	38,247	37,852	76,099
15.	Kasihan	38.048	38.188	76.236	38,975	39,069	78,044
16.	Pajangan	14.393	15.309	29.702	14,636	15,499	30,135
17.	Sedayu	20.743	21.738	42.481	21,295	22,268	43,563
Jumlah		383.841	399.579	789.785	390,534	406,329	806,539

Sumber : BPS dan Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bantul

5.1.1.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan mata pencahariannya dapat dilihat pada kedua Tabel di bawah ini.

Tabel 5.6.
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenin kelamin di Kabupaten Bantul tahun 2001 dan 2003

No.	Lapangan Pekerjaan	Tahun	
		2001	2003
1.	Pertanian	28,68	25,56
2.	Pertambangan dan penggalian	1,05	1,98
3.	Industri	19,23	18,95
4.	Listrik, gas dan air	0,09	0,07
5.	Konstruksi	7,79	8,88
6.	Perdagangan	20,72	21,16
7.	Komunikasi/transportasi	4,20	4,64
8.	Keuangan	1,23	1,61
9.	Jasa	17,01	16,89
10.	Lainnya	0,00	0,27
Jumlah		100,00	100,00

Sumber : Statistik dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Bantul

Tabel 5.7.
Kepadatan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Kab.Bantul
Tahun 2003

Tahun 2000															
No	Kecamatan	MATA PENCAHARIAN													
		Pertanian	Nelayan	Industri / Usaha seanean / besar	Pengrajin Industri Kecil	BURUH					Pedagan g	Penga ngkuta n	PNS	ABRI	Pensi un PNS
						Tani	Industri	Bangun an	Pertam banga n	Perkeb unan besar/ kecil					
1	Srandakan	5,444	61	0	50	1,723	899	78	0	0	2,693	194	1,035	59	242
2	Sanden	12,004	30	0	437	2,045	10	500	75	0	815	100	1,510	176	340
3	Kretek	9,875	295	0	403	7,340	686	1,476	138	0	1,476	138	162	109	139
4	Pundong	14,610	0	0	915	728	82	219	100	0	301	2	571	130	191
5	Bambanglupuro	10,048	0	0	310	3,123	28	1,325	15	0	1,240	113	1,224	185	393
6	Pandak	8,080	0	123	15,539	7,584	1,125	950	1,210	1	1,059	45	1,084	137	293
7	Bantul	9,690	0	0	741	2,847	659	2,764	0	0	785	156	890	0	247
8	Jetis	8,183	0	12	15	2,139	412	1,771	0	0	1,762	8	1,402	244	798
9	Imogiri	15,753	0	126	42	2,922	0	3,263	0	0	4,612	328	1,784	296	535
10	Dlingo	9,419	0	19	2,880	3,112	1,534	2,547	46	53	143	911	916	263	284
11	Pleret	6,201	0	50	69	1,182	0	487	0	69	30	327	415	41	50
12	Piyungan	15,985	0	13	0	1,931	539	0	0	0	4,152	851	3,038	1,036	584
13	Banguntapan	17,727	0	0	300	612	380	1,995	20	0	1,287	165	1,745	256	512
14	Sewon	12,019	0	53	210	4,407	248	550	554	308	835	548	1,052	215	280
15	Kasihan	11,087	0	37	2,384	1,756	3,526	9,283	0	40	6,515	1,013	588	489	782
16	Pajangan	9,460	0	5	1,549	3,059	8,625	5,115	246	816	8,614	2,550	4,736	50	996
17	Sedayu	6,194	0	547	875	4,345	751	2,563	793	675	653	221	1,046	337	713
Jumlah		181,729	386	987	26,719	50,855	19,285	34,889	3,197	1,960	36,952	7,668	23,176	4,033	7,383

Sumber : BPS dan Bagian Tata Pemerintahan, Tahun 2004

5.1.1.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 5.8.
Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan di Kabupaten Bantul tahun 2001 dan 2003

No.	Pendidikan	Tahun	
		2001	2003
1.	Tidak/belum pernah sekolah	30,92	28,23
	Tidak/belum tamat SD		
2.	Sekolah Dasar	24,48	24,02
3.	SLTP Umum dan Kejuruan	16,88	17,59
4.	SLTA Umum	13,30	15,21
5.	SLTA Kejuruan	8,64	8,42
6.	D1/D2	1,06	1,26
7.	Akademi / D3	1,48	1,70
8.	D4 - S3	3,24	3,57
Jumlah		100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Bantul (Susenas 2001-2002)

5.1.1.8. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1

Selama kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2003 perkembangan keluarga miskin cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya faktor krisis ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, walaupun di Kabupaten Bantul keluarga/penduduk miskin masih relatif cukup tinggi, dari tahun ke tahun tetap mengalami penurunan yang cukup berarti.

Berdasarkan tingkat kemiskinan tahun-tahun sebelumnya serta dengan memperhitungkan tingkat inflasi dan perkiraan pendapatan riil penduduk, diperoleh garis batas kemiskinan secara ekonomi sebesar Rp. 113.536 (tahun 2003). Dengan garis batas ini, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bantul pada tahun 2003 adalah sebanyak 157.424 orang atau sebanyak 33.141 KK dari jumlah penduduk sebanyak 796.821 orang. Jumlah ini jauh lebih menurun dibandingkan dengan jumlah KK miskin tahun 2000, 2001, dan 2002.

Penurunan jumlah KK miskin, berdasarkan perhitungan data BPS adalah sebagai berikut : jumlah KK miskin tahun 2000 sebanyak 262.325 jiwa atau 55.226 KK; tahun 2001 turun menjadi 235.600 jiwa atau 49.600 KK; tahun 2002 turun menjadi 170.286 jiwa atau 35.849 KK; dan pada tahun 2003 turun lagi menjadi 157.424 orang atau sebanyak 33.141 KK.

Angka kemiskinan seringkali rancu yang disebabkan oleh perbedaan indikator yang digunakan (antara lain Statistik, BKKBN, Dinas Kesehatan, PMD, dan sebagainya) sehingga masih ada kesimpangsiuran data. Mengingat banyaknya masukan, termasuk dari DPRD Kabupaten Bantul yang menghendaki ada *indikator tunggal* yang lebih sesuai dengan keadaan riil Kabupaten Bantul, maka telah dibentuk "Tim Independen" yang unsumnya terdiri dari lintas instansi dan *stakeholders* terkait lainnya, untuk melakukan pendataan ulang. Hasil pendataan tersebut akan diumumkan di setiap balai dusun dan kantor desa sehingga dapat diketahui dan dikontrol oleh masyarakat sendiri. Dari uji survey terhadap lima klaster di lima kecamatan, menunjukkan hasil penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan angka kemiskinan Kabupaten Bantul yang ada, yaitu turun sekitar 39,65%.

Untuk lebih menajamkan analisis data penduduk yang termasuk dalam kategori Pra-S dan KS-1, diperlukan perhitungan-perhitungan untuk mencari jumlahnya. Pencermatan terhadap jumlah keluarga Pra-S dan KS-1 sangat berguna bagi upaya-upaya penentuan/alokasi proyek-proyek yang bersifat percepatan dalam menangani

kemiskinan. Dalam Tabel dibawah diperlihatkan jumlah penduduk Pra-S dan KS-1 di Kabupaten Bantul tahun 2003 yang dihitung berdasarkan jumlah KK dikalikan dengan rata-rata jiwa per KK (sebesar 4,75).

Tabel 5.9.
Jumlah penduduk Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1
di Kabupaten Bantul tahun 2003

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Jiwa dalam keluarga			Jumlah Keluarga Pra-S & KS-1	Jumlah Jiwa Keluarga Miskin	Status Ekonomi		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			Miskin Sekali	Miskin	Jumlah
1	Kretek	13.354	13.889	27.243	2.390	4.521	649	838	1.487
2	Sanden	14.385	14.829	29.214	3.086	4.840	1.007	478	1.485
3	Srandakan	14.007	14.280	28.287	3.173	6.173	893	916	1.809
4	Pandak	23.310	22.844	46.154	6.556	12.555	1.821	1.667	3.488
5	Bambanglipuro	17.379	18.059	35.438	3.779	7.505	627	1.159	1.786
6	Pundong	15.323	15.819	31.142	3.039	6.266	211	1.212	1.423
7	Imogiri	26.290	27.013	53.303	8.197	21.964	3.004	1.906	4.910
8	Dlingo	17.446	17.686	35.132	6.016	10.350	2.121	907	3.028
9	Jetis	23.838	24.541	48.379	5.419	9.163	756	1.724	2.480
10	Bantul	25.580	26.056	51.636	4.122	9.943	927	1.949	2.876
11	Pajangan	14.244	14.388	28.632	3.543	4.301	954	246	1.200
12	Sedayu	19.430	19.234	38.664	4.028	6.551	1.015	888	1.903
13	Kasihan	39.653	40.222	79.875	6.163	9.839	1.488	1.205	2.693
14	Sewon	38.469	38.326	76.795	6.156	11.735	1.367	1.778	3.145
15	Piyungan	19.873	20.073	39.946	4.819	10.708	1.938	1.392	3.330
16	Pleret	17.948	18.222	36.170	5.015	12.038	2.037	1.440	3.477
17	Banguntapan	40.996	41.829	82.825	6.620	12.013	1.169	2.107	3.276
Jumlah		381.525	387.310	768.835	82.121	160.465	21.984	21.812	43.796

Sumber: BKKBN Kabupaten Bantul

5.1.1.9. Tenaga Kerja dan Pengangguran

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat menentukan keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila ternyata SDM di usia produktif banyak yang menjadi pengangguran. Hal ini tentunya mengakibatkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian tersendiri. Sementara untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis yang mengenai semua lini kehidupan, dibutuhkan suatu pendekatan multidimensional pada semua sektor. Data terakhir mengenai jumlah tenaga kerja dan penganggur dapat dilihat pada Tabel 5.10, sementara data pencari kerja dapat dilihat pada Tabel 5.11. dan data penempatan tenaga kerja tahun 2001 dan 2003 dapat dilihat pada Tabel 5.12. dibawah ini.

Tabel 5.10.
Data Tenaga Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Bantul Tahun 2003

No.	Kecamatan	Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah Pengangguran
1.	Srandakan	14.936	1.102
2.	Sariden	17.222	703
3.	Kretek	15.239	1.272
4.	Pundong	18.209	1.132
5.	Bambaglipuro	19.343	3.017
6.	Pandak	26.618	1.308
7.	Bantul	30.605	1.991
8.	Jetis	30.082	1.995
9.	Imogiri	31.176	1.278
10.	Dlingo	19.675	562
11.	Pleret	21.761	1.104
12.	Piyungan	22.430	873
13.	Banguntapan	47.640	3.009
14.	Sewon	44.715	4.486
15.	Kasihan	46.287	2.536
16.	Pajangan	15.961	1.021
17.	Sedayu	21.872	1.761
Jumlah		443.771	29.150

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Bantul

Tabel 5.11.
Pencari Kerja di Kabupaten Bantul Tahun 2003

No.	Tingkat Pendidikan Pencari Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD	20	30	50
2.	SMP	266	489	755
3.	SMA	1.645	1.855	3.500
4.	STM	1.909	218	2.127
5.	SMEA	369	940	1.309
6.	SPG	-	-	0
7.	SKKA	-	-	0
8.	SPMA	-	-	0
9.	Setingkat SLTA	321	432	753
10.	D.I, D.II	65	101	166
11.	D.III, Sarjana Muda	245	468	713
12.	S1	919	1.404	2.323
13.	S2	3	7	10
Jumlah		5.762	5.944	11.706

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Bantul

Tabel 5.12.
Penempatan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2001 dan 2003

No.	Penempatan Tenaga Kerja	Tahun	
		2001	2003
1.	Antar Kerja Antar Lokal (AKL)	366	12.970
2.	Teknologi Tepat Guna (TTG)	35	20
3.	Perluasan Kerja sistem Padat Karya (PKSPK)	-	20
4.	Bursa Kerja Khusus (BKK)	16	-
5.	Penugasan Belajar Usaha Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	8	30
6.	Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	-	20
7.	Padat Karya Dampak Kekeringan		480
8.	Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	-	7
9.	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	373	802
10.	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)	280	704
11.	Bursa Kerja Khusus (BKK)	619	113
Jumlah		1.697	15.194

Sumber : Disnakertrans Kabupaten Bantul

5.1.2. Gambaran Umum Kecamatan Srandakan

Kecamatan Srandakan memiliki 2 kelurahan yang terdiri dari Kelurahan Trimurti dan Kelurahan Poncosari. Kedua kelurahan ini memiliki tipologi yang berbeda, yakni Kelurahan Poncosari sarat dengan daerah pertaniannya sementara Kelurahan Trimurti adalah merupakan daerah *karangkopek* yang memiliki lahan terbatas untuk pertanian. Dengan demikian Kelurahan Trimurti cenderung lebih mengembangkan pada usaha-usaha pengembangan industri rumah tangga, sementara Kelurahan Poncosari menekankan pada pengembangan pertanian.

Jumlah penduduk keseluruhan di Kecamatan Srandakan ada sebanyak 28.903 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) di kecamatan ini sebanyak 7.762 orang.

Tabel 5.13.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No.	Umur	Laki-laki		Perempuan	
		Tinggal	Merantau	Tinggal	Merantau
1.	0 – 12 bulan	219	11	184	3
2.	13 bulan – 4 tahun	533	9	535	9
3.	5 tahun – 6 tahun	396	5	415	11
4.	7 tahun – 12 tahun	1146	18	1067	11
5.	13 tahun – 15 tahun	616	6	901	10
6.	16 tahun – 18 tahun	701	38	702	49
7.	19 tahun – 25 tahun	1740	298	1609	349
8.	26 tahun – 35 tahun	2081	355	2045	306
9.	36 tahun – 45 tahun	2021	157	2026	128
10.	46 tahun – 50 tahun	812	75	888	41
11.	51 tahun – 60 tahun	1195	21	1216	21
12.	61 tahun – 75 tahun	1290	16	1401	3
13.	> 76 tahun	433	5	472	4

Sumber : Data Pendataan Sibermas, Tahun 2005

Data di atas menunjukkan bahwa pengelompokan umur penduduk Kecamatan Srandakan berada pada kisaran usia reproduktif atau antara 16 tahun – 50 tahun. Hal ini ditunjukkan dari distribusi penyebaran jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur yang memperlihatkan sebanyak 14.625 orang (54,89 %) pada kelompok usia antara 16 tahun – 50 tahun. Sementara usia anak-anak yang ditunjukkan pada klaster kelompok umur < 16 tahun ada sebanyak 6.012 orang (22,56 %) dan kelompok usia tua yang masuk pada klaster usia di atas 50 tahun ada sebanyak 6.007 orang (22,55 %).

Distribusi pengelompokan umur seperti yang telah disebutkan di atas, nampaknya relatif sama antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan

perempuan. Berdasarkan jenis kelamin inipun pengelompokkan usia anak-anak, produktif dan usia tua nampaknya terdapat pada klaster usia yang hampir sama.

Tabel 5.14.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

No.	Mata Pencarian	Pokok	Tambahan
1.	Petani	1734	169
2.	Buruh Tani	1664	175
3.	Pengusaha/UKM	381	80
4.	Buruh Industri/Bangunan	1578	265
5.	Pedagang	1915	425
6.	Jasa	192	50
7.	Nelayan	8	45
8.	PNS/ABRI	811	44
9.	Pensiunan	385	15
10.	Karyawan	201	173
11.	Guru	30	7
12.	Penambang Pasir/Batu	180	184
13.	Peternak	31	32
14.	Pengrajin	52	53
15.	Pamong Desa	87	20
16.	Dosen	1	
17.	Perawat		1
18.	Dokter Hewan		1
19.	Lain-lain	212	11
20.	Tidak Bekerja	9	0

Sumber : Data Pendataan Sibermas, Tahun 2005

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penduduk yang memiliki mata pencarian pokok ada sebanyak 9.471 orang dan yang memiliki mata pencarian sampingan atau tambahan ada sebanyak 1.750 orang. Dari data penduduk menurut mata pencarian ini, nampaknya masih banyak penduduk yang sampai saat ini masih menekuni aktivitas pertanian sebagai mata pencahariannya yakni sebanyak 3.398 orang (35,88 %). Sedangkan mata pencarian pedagang juga diminati oleh sebagian penduduk di kecamatan ini yakni sebanyak 1915 orang (20,22 %), selanjutnya buruh industri atau bangunan pun menjadi tumpuan bagi penduduk Kecamatan Srandakan untuk mata pencarian mereka (16,67 %).

Mata pencarian sebagai pedagang dan buruh industri atau bangunan dipilih oleh sebagian penduduk sebagai mata pencarian sampingan atau tambahan, adapun yang memilih mata pencarian sebagai pedagang untuk mata pencarian sampingan atau tambahan ada sebanyak 425 orang dan yang memilih mata pencarian buruh industri atau bangunan sebagai mata pencarian sampingan atau tambahan sebanyak

265 orang. Secara lengkap untuk jenis mata pencaharian penduduk baik yang pokok maupun sampingan atau tambahan dapat dilihat pada tabel di atas.

Tabel 5.15.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Lulus	Sedang Ditempuh	Tidak Lulus
1.	SD/Sederajat	5209	1430	1801
2.	SLTP/Sederajat	3202	1328	250
3.	SLTA/Sederajat	5653	1221	267
4.	Diploma	896	135	16
5.	S-1	745	342	51
6.	S-2	11	16	1
7.	S-3	1	4	0

Sumber : Data Pendataan Sibermas, Tahun 2005

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk di Kecamatan Srandakan telah menempuh jenjang pendidikan hingga SLTP (55,31 %), sementara mereka yang telah menempuh jenjang pendidikan hingga SLTA ada sebanyak 6.874 orang (34,04 %). Penduduk yang berpendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi ada sebanyak 2.150 orang (10,65 %), bahkan diketemukan ada sebanyak 27 orang (00,13 %) yang menempuh hingga pendidikan S-2 dan juga S-3 yakni sebanyak 5 orang (00,02 %).

Berdasarkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka penduduk di Kecamatan Srandakan relatif telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik, karena paling tidak mereka telah mampu menempuh pendidikan hingga tingkat SLTP. Secara lengkap mengenai jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 5.15. di atas.

5.2. Status Sosial Ekonomi Responden Dan Keluarga

5.2.1. Identitas Penerima Bantuan

Tabel 5.16.
Kelas Dan Jenis Kelamin Responden

Kelas	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-laki		Perempuan			
	N	%	N	%	N	%
1 – 2 SD	0	00,00	2	04,00	2	04,00
3 – 4 SD	10	20,00	18	36,00	28	56,00
5 – 6 SD	8	16,00	12	24,00	20	40,00
Jumlah	18	36,00	32	64,00	50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Penerima bantuan program “babonisasi” di Kabupaten Bantul adalah para siswa Sekolah Dasar (SD) yang berdomisili dan atau bersekolah di lingkup Kabupaten Bantul.

Tujuan utama program iri adalah untuk memberi asupan gizi kepada siswa SD, supaya mereka dapat tercukupi gizinya dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat kecerdasannya. Data mengenai penerima bantuan program "babonisasi" yang terkumpul dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sebagian besar adalah berasal dari siswa kelas 3 – 4 SD (56,00 %) dan rata-rata mereka adalah berjenis kelamin perempuan yakni ada sebanyak 32 orang (64,00 %).

Perbedaan jumlah penerima bantuan antara yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak secara signifikan menunjukkan bahwa yang mendapat bantuan dalam program ini diprioritaskan siswa yang berjenis kelamin perempuan. Hal ini tentunya hanya suatu kebetulan saja yang kemungkinan pada saat pengambilan sampel yang banyak ditemui adalah siswa yang berjenis kelamin perempuan. Secara lengkap untuk identitas penerima bantuan dapat dilihat pada tabel 5.16.

5.2.2. Kondisi Permukiman Keluarga Responden

Kondisi permukiman keluarga responden dapat diuraikan sebagai berikut : sebagian besar dinding rumah responden telah terbuat dari tembok/bata, meskipun jika dilihat ada sebagian yang dinding rumahnya belum diplester. Hal ini dapat dilihat dari sebanyak 50 orang responden ternyata ada sebanyak 33 orang (66,00 %) yang menyatakan bahwa dinding rumah mereka terbuat dari tembok/bata.

Lantai rumah dari responden rata-rata adalah berupa plester dan tanah. Hasil tersebut terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden kondisi lantai rumah mereka adalah berupa plester (38,00 %) dan tanah (30,00 %). Sedangkan untuk atap rumah sebagian besar responden menyatakan bahwa rumah mereka beratapkan genting yakni 27 orang (34,00 %) dan sebagian lagi menyatakan seng yakni sebanyak 13 orang (26,00 %). Sementara penerangan yang dipakai oleh sebagian besar keluarga responden adalah berupa listrik (40,00 %) dan juga adapula yang masih menggunakan lampu teplok/gantung yakni sebesar 14 orang (28,00 %).

Rata-rata keluarga responden memiliki sumur sendiri (44,00%) untuk keperluan pemenuhan air dalam keluarga mereka, akan tetapi juga masih ada yang menggunakan fasilitas sumur umum (22,00 %). Sementara itu sarana MCK sebagian besar responden menyatakan telah mempunyai sendiri (66,00 %) yang menyatakan tidak punya ada sebanyak 10 orang (20,00 %). Status rumah yang dimiliki saat ini adalah milik sendiri (76,00 %) dan yang menyatakan menyewa ada sebanyak 7 orang (14,00 %).

Tabel 5.17.
Kondisi Permukiman Keluarga Responden

No.	Permukiman	Jumlah	%
1.	Dinding Rumah		
	a. Tembok/bata	33	66,00
	b. Kayu	1	02,00
	c. Bambu	11	22,00
	d. Kotangan	4	08,00
	e. Batako	1	02,00
		50	100,00
2.	Lantai Rumah		
	a. Keramik	7	14,00
	b. Tegel/teraso	5	10,00
	c. Plester	19	38,00
	d. Tanah	15	30,00
	e. Giring	4	08,00
		50	100,00
3.	Atap Rumah		
	a. Genteng	27	54,00
	b. Seng	13	26,00
	c. Asbes	8	16,00
	d. Rumbia/rapak	2	04,00
		50	100,00
4.	Penerangan Rumah Tangga		
	a. Listrik	20	40,00
	b. Lampu teplok/gantung	14	28,00
	c. Petromak	9	18,00
	d. Sentir	2	04,00
	e. Listrik menyalur dari tetangga	5	10,00
		50	100,00
5.	Air Untuk Rumah Tangga		
	a. Sumur sendiri	22	44,00
	b. Sumber	8	16,00
	c. Umum	11	22,00
	d. PAH	4	08,00
	e. Kamar Mandi Umum	3	06,00
	f. PAM	2	04,00
		50	100,00
6.	Sarana MCK		
	a. Punya sendiri	33	66,00
	b. Umum	7	14,00
	c. Tidak punya	10	20,00
		50	100,00
7.	Status Rumah Keluarga		
	a. Milik sendiri	38	76,00
	b. Menumpang	5	10,00
	c. Menyewa	7	14,00
		50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Secara lengkap mengenai kondisi permukiman keluarga responden nampak pada tabel 5.17. Berdasarkan tabel kondisi permukiman keluarga terlihat bahwa rata-rata keluarga responden berasal dari keluarga strata bawah, sehingga bantuan untuk peningkatan gizi bagi siswa SD dirasa tepat sasaran. Hal ini disebabkan masyarakat dari golongan bawah inilah yang memang masih perlu diberdayakan, karena mereka tidak atau belum memiliki akses untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan mereka termasuk pemenuhan kebutuhan gizi bagi anak-anak mereka.

5.2.3. Pendidikan Dan Pekerjaan Orang Tua Responden

Tabel 5.18.
Tingkat Pendidikan Ayah Dan Ibu Responden

Tingkat Pendidikan Ayah	Tingkat Pendidikan Ibu									
	Tamat SD		Tamat SLTP		Tamat SLTA		Sarjana		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Tamat SD	5	62,50 50,00	2	25,00 07,14	1	12,50 09,09	0	00,00 00,00	8	100,00 16,00
Tamat SLTP	3	20,00 30,00	8	53,33 28,57	4	26,67 36,37	0	00,00 00,00	15	100,00 30,00
Tamat SLTA	2	08,70 20,00	18	78,26 64,29	3	13,04 27,27	0	00,00 00,00	23	100,00 46,00
Sarjana	0	00,00 00,00	0	00,00 00,00	3	75,00 27,27	1	25,00 100,00	4	100,00 08,00
Jumlah	10	20,00 100,00	28	56,00 100,00	11	22,00 100,00	1	02,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Pendidikan orang tua responden rata-rata masih tergolong rendah terutama tingkat pendidikan ibu responden. Secara rinci mengenai tingkat pendidikan orang tua responden dapat dilihat pada tabel 5.18. di atas. Berdasarkan tabel 5.18. ini nampak bahwa rata-rata tingkat pendidikan ibu responden adalah tamat SLTP (56,00 %), sementara tingkat pendidikan ibu yang sampai pada jenjang SLTA ada sebanyak 11 orang (22,00 %) bahkan yang sampai jenjang Perguruan Tinggi hanya ada 1 orang (02,00 %).

Tingkat pendidikan ayah responden setinggi-tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pendidikan ibu responden. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang memperlihatkan ada sebanyak 23 orang (46,00 %) yang berpendidikan tamat SLTA dan ada sebanyak 4 orang (08,00 %) berpendidikan Perguruan Tinggi. Menurut tingkat pendidikan ayah dan ibu responden maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan ayah adalah sedang sementara tingkat pendidikan ibu responden termasuk dalam kategori yang masih rendah. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan program "babonisasi" perlu dilakukan pembinaan peningkatan kesadaran gizi bagi ibu responden agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya berkenaan dengan gizi keluarga,

sehingga program yang dicanangkan untuk peningkatan gizi anak-anak SD dapat berhasil optimal.

Tabel 5.19.
Jenis Pekerjaan Pokok Ayah Dan Ibu Responden

Jenis Pekerjaan Ayah	Jenis Pekerjaan Ibu											
	Petani		Pegawai Negeri/Swasta		Wiraswasta/ Pedagang/Pengrajin		Buruh		Tidak Bekerja		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Petani	10	45,45 58,82	2	09,09 50,00	2	09,09 22,22	3	13,64 37,50	5	22,73 41,67	22	100,00 44,00
Pegawai Negeri/Swasta	1	25,00 05,88	0	00,00 00,00	2	50,00 22,22	0	00,00 00,00	1	25,00 08,33	4	100,00 08,00
Wiraswasta/ Pedagang/Pengrajin	2	20,00 11,77	0	00,00 00,00	4	40,00 44,45	1	10,00 12,50	3	30,00 25,00	10	100,00 20,00
Buruh	4	44,45 23,53	1	11,11 25,00	0	00,00 00,00	2	22,22 25,00	2	22,22 16,67	9	100,00 18,00
Tidak Bekerja	0	00,00 00,00	1	20,00 25,00	1	20,00 11,11	2	40,00 25,00	1	20,00 08,33	5	100,00 10,00
Jumlah	17	34,00 100,00	4	08,00 100,00	9	18,00 100,00	8	16,00 100,00	12	24,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Jenis pekerjaan pokok ibu responden dan ayah responden rata-rata adalah sebagai petani. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa sebagian besar ayah responden adalah bermata pencaharian sebagai petani (44,00 %) dan ibu juga memiliki pekerjaan pokok sebagai petani (34,00 %). Sementara pekerjaan sebagai wiraswasta/pedagang/pengrajin juga banyak ditekuni oleh sebagian ayah responden (20,00 %), sedangkan ibu responden yang tidak bekerja dalam hal ini diketahui banyak pula (24,00 %), urutan jenis pekerjaan pokok ibu yang menyatakan tidak bekerja adalah berada di urutan kedua setelah pekerjaan pokok ibu sebagai petani.

Berdasarkan jenis pekerjaan ayah dan ibu, nampak bahwa dilihat dari jenis pekerjaan yang dimiliki oleh orang tua responden, maka kondisi ekonomi keluarga responden masuk dalam kategori strata menengah bawah ke bawah. Untuk memperjelas keadaan kondisi ekonomi keluarga responden dapat pula dilihat dari jumlah pendapatan orang tua responden yang ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.20.
Jumlah Pendapatan Orang Tua

Jumlah Pendapatan	N	%
< Rp. 500.000,-	21	42,00
Rp. 500.000,- - Rp. 1.000.000,-	15	30,00
Rp. 1.001.000,- - Rp. 1.500.000,-	5	10,00
Rp. 1.501.000,- - Rp. 2.000.000,-	6	12,00
> Rp. 2.000.000,-	3	06,00
Jumlah	50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Rata-rata pendapatan orang tua responden adalah kurang dari RP. 1.000.000,- dalam sebulan. Pernyataan tersebut dibuktikan dari hasil penelitian ini yang memperlihatkan ada sebanyak 21 orang (42,00 %) yang menyatakan pendapatan orang tua mereka kurang dari Rp. 500.000,- dalam sebulan, sementara yang menyatakan pendapatan orang tua mereka di atas Rp. 1.000.000,- hanya ada sebanyak 14 orang (28,00 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua responden memiliki penghasilan yang masih berada di bawah upah minimum, ini tentunya akan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi dalam keluarga mereka. Oleh karena itu dengan program bantuan berupa pemberian babon tentunya akan meringankan beban mereka untuk dapat mencukupi kebutuhan gizi bagi anak-anak mereka.

5.3. Pelaksanaan Program Babonisasi Di Kabupaten Bantul

Rata-rata jumlah anak yang menerima bantuan babon dalam keluarga adalah sebanyak 1 orang (68,00 %) dan rata-rata tahap penerimaan adalah pada tahap I tahun 2003 (74,00 %). Hal ini didasarkan dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat yang memberikan bantuan berupa babon sebanyak 3 ekor kepada para siswa yang Sekolah Dasar (SD) yang berdomisili di Kabupaten Bantul. Program dicanangkan mulai tahun 2003 yakni sekitar bulan Oktober, dan periode tersebut adalah merupakan tahap I atau awal pencanangan program "babonisasi".

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan nampaknya ada sebanyak 37 orang (74,00 %) yang menerima bantuan babon di tahap I tahun 2003 dan ada sebanyak 13 orang (26,00 %) yang menerima bantuan babon di tahap II tahun 2003. Sementara dari jumlah anak yang menerima program "babonisasi" ada sebanyak 34 orang (68,00 %) yang dalam keluarga tersebut jumlah anak yang menerima bantuan babon adalah 1 anak saja, kemudian ada sebanyak 14 orang (28,00 %) yang menyatakan jumlah anak dalam keluarga mereka yang menerima bantuan babon sebanyak 2 orang, dan sebanyak 2 orang (04,00 %) yang menyatakan bahwa jumlah anak yang menerima bantuan babon adalah lebih dari 2 orang.

Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah anak yang menerima bantuan babon dalam satu keluarga dan tahap penerimaan yang mereka peroleh dapat dilihat pada tabel 5.21. di bawah ini.

Tabel 5.21.

Jumlah Anak Penerima Bantuan "Babonisasi" Dan Tahap Penerimaan

Jumlah Anak Dalam Keluarga Penerima Bantuan Babonisasi	Tahap Penerimaan					
	Tahap I Tahun 2003		Tahap II Tahun 2003		Total	
	N	%	N	%	N	%
1 orang	27	79,41 72,97	7	20,59 53,85	34	100,00 68,00
2 orang	8	57,14 21,62	6	42,86 46,15	14	100,00 28,00
> 2 orang	2	100,00 05,41	0	00,00 00,00	2	100,00 04,00
Jumlah	37	74,00 100,00	13	26,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Pemberian bantuan babon kepada siswa Sekolah Dasar (SD) dimaksudkan agar siswa-siswa tersebut dapat tercukupi kebutuhan gizinya, yakni dengan cara memanfaatkan telur yang dihasilkan dari ayam babon yang diberikan. Hal tersebut dilakukan agar dengan mengkonsumsi telur secara teratur dan dalam frekuensi yang intensif diharapkan akan meningkatkan kecerdasan dari siswa yang bersangkutan.

Frekuensi bertelur ayam tentunya juga dipengaruhi oleh bagaimana cara pemeliharaan terhadap ayam tersebut. Rata-rata ayam babon yang diterima siswa dipelihara sendiri (62,00 %), sementara yang lainnya ada yang dipelihara oleh orang lain (18,00 %), kemudian dipelihara di sekolah (04,00 %) dan bahkan ada yang dijual yakni dilakukan oleh sebanyak 8 siswa (16,00 %).

Alasan yang disampaikan oleh para siswa mengapa mereka tidak memelihara sendiri ayam adalah karena mereka : tidak ada tempat untuk memelihara ayam di rumah, ini dipilih oleh sebanyak 9 orang siswa (47,37 %), kemudian sebanyak 3 orang (15,79 %) menyakan ayam mereka sudah sakit-sakitan, lalu sebanyak 4 orang (21,05 %) yang memberi alasan mereka tidak telaten atau malas untuk memelihara ayam, dan sebanyak 2 orang (10,53 %) yang menyatakan mereka menjual ayam mereka demi untuk kebutuhan sekolahnya, selanjutnya ada sebanyak 1 orang (05,26 %) yang menyatakan mereka tidak bisa memelihara ayam.

Frekuensi bertelur ayam menurut responden sampai saat ini rata-rata adalah sudah sering (58,00 %), kemudian yang menyatakan kadang-kadang adalah sebanyak 12 orang (24,00 %), lalu yang menyatakan frekuensi bertelur ayam dirasakan jarang adalah sebanyak 3 aorang (06,00 %) dan yang menyatakan bahwa ayam mereka sampai saat ini belum pernah bertelur ada sebanyak 6 orang (12,00 %).

Secara lengkap frekuensi bertelur ayam dan cara pemeliharaan ayam yang selama ini dilakukan oleh para siswa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.22.
Frekuensi Bertelur Dan Cara Pemeliharaan Ayam

Frekuensi Bertelur Ayam	Cara Pemeliharaan Ayam									
	Dipelihara Sendiri		Dipelihara Orang Lain		Dipelihara di Sekolah		Dijual		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Sering	24	82,76 77,42	4	13,79 44,45	0	00,00 00,00	1	03,45 12,50	29	100,00 58,00
Kadang-kadang	6	50,00 19,35	2	16,67 22,22	2	16,67 100,00	2	16,67 25,00	12	100,00 24,00
Jarang	0	00,00 00,00	2	66,67 22,22	0	00,00 00,00	1	33,33 12,50	3	100,00 06,00
Tidak Pernah	1	16,67 03,23	1	16,67 11,11	0	00,00 00,00	4	66,66 50,00	6	100,00 12,00
Jumlah	31	62,00 100,00	9	18,00 100,00	2	04,00 100,00	8	16,00 100,00	50	100,00 100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Sementara berkenaan dengan pemanfaatan telur ketika pertama kali ayam mereka bertelur adalah sebagian besar menyatakan dimakan sendiri (76,47 %), lalu sebanyak 5 orang (14,71 %) menyatakan bahwa telur ayam yang dihasilkan untuk pertama kalinya ayam tersebut bertelur adalah ditetaskan, dan ada sebanyak 3 orang (08,82 %) yang menyatakan bahwa telur ayam adalah dijual.

Berdasarkan tujuan utama dari program "babonisasi" ini adalah sebagai pemberian tambahan gizi bagi siswa SD dengan kebiasaan untuk makan telur. Untuk itu seharusnya telur dimanfaatkan oleh siswa SD tersebut dengan cara dikonsumsi, oleh karena itu jika kemudian telur tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh siswa melainkan untuk tujuan lain adalah merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran, apalagi telur tersebut kemudian dijual. Namun hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memanfaatkan telur yang dihasilkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga secara menyeluruh program babonisasi yang dicanangkan telah mengenai sasaran, yakni membiasakan siswa SD untuk makan telur agar dapat tercukupi kebutuhan proteinnya yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan mereka.

Tabel 5.23.
Pemanfaatan Telur Saat Pertama Kali Ayam Bertelur

Pemanfaatan Telur	N	%
Dimakan sendiri	26	76,47
Ditetaskan	5	14,71
Dijual	3	08,82
Jumlah	34	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Tabel 5.24.
Kondisi Perkembangan Ayam Saat Ini

Kondisi Perkembangan Ayam	N	%
Sangat Banyak	19	38,00
Cukup Banyak	10	20,00
Sedikit	11	22,00
Tidak Berkembang/Tetap	6	12,00
Sebagian Mati	3	06,00
Semua Mati	1	02,00
Jumlah	50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Kondisi mengenai perkembangan ayam sampai saat ini terlihat bahwa rata-rata adalah cukup menggembirakan. Hal ini nampak dari sebagian besar responden yang menyatakan bahwa ayam mereka sampai saat ini telah berkembang cukup banyak bahkan sangat banyak (58,00 %), sedangkan yang menyatakan bahwa ayam mereka hingga saat ini tidak berkembang hanya dinyatakan oleh sebanyak 6 orang (12,00 %), kemudian yang menyatakan bahwa ayam mereka sebagian mati ada sebanyak 3 orang (06,00 %) dan sebanyak 1 orang yang menyatakan ayam mereka semuanya sudah mati (02,00 %).

Meskipun secara keseluruhan jumlah ayam yang tidak berkembang bahkan mati adalah relatif cukup sedikit, akan tetapi hal ini perlu dipikirkan mengenai peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk cara-cara pemeliharaan ayam yang baik dan benar, sehingga siswa tersebut dapat mendeteksi kesehatan ayam dan melakukan tindakan preventif dan kuratif jika ayam mereka terkena penyakit.

Tabel 5.25.
Pemanfaatan Ayam Untuk Pemenuhan Gizi Anak

Pemanfaatan Ayam Untuk Pemenuhan Gizi Anak	N	%
Diambil Daging dan Telurnya	22	44,00
Diambil Dagingnya Saja	5	10,00
Diambil Telur Saja	15	30,00
Tidak Pernah Memanfaatkan	8	16,00
Jumlah	50	100,00

Sumber : Data Primer Diolah Tahun 2005

Program "babonisasi" seperti telah dijelaskan di muka adalah sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa SD, untuk itu seyogyanya ada unsur kemanfaatan yang diperoleh para siswa dengan bantuan ayam babon yang diberikan. Unsur kemanfaatan tersebut tentunya dikaitkan dengan tujuan utama dari program yang dicanangkan. Secara menyeluruh program babonisasi untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sudah tercapai, karena sebagian besar siswa sudah dapat memanfaatkan baik daging maupun telur dari hasil program "babonisasi" tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini sudah ada sebanyak 22 orang siswa (44,00 %) yang telah memanfaatkan daging dan telur untuk peningkatan kebutuhan gizi mereka, sementara yang baru memanfaatkan telur saja dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka adalah sebanyak 15 orang (30,00 %), dan sebanyak 5 orang (10,00 %) yang menyatakan sampai saat ini mereka baru memanfaatkan dagingnya saja untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka. Sedangkan ada sebanyak 8 orang (16,00 %) yang menyatakan hingga saat ini mereka tidak pernah memanfaatkan baik daging maupun telur dari ayam hasil bantuan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka telah menjual ayamnya yang dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya : ayam tersebut sakit-sakitan dan kemudian juga ada yang menjual untuk mencukupi kebutuhan sekolah siswa.

5.4. Evaluasi Pelaksanaan Program Babonisasi Di Kabupaten Bantul

Evaluasi program babonisasi berdasarkan hasil penelitian ini nampaknya telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar penduduk di Kabupaten Bantul pada umumnya dan Kecamatan Srandakan pada khususnya, terutama yang memiliki anak-anak yang duduk di Sekolah Dasar. Sebagian besar ayam babon yang diserahkan kepada para siswa dalam program babonisasi telah dinikmati hasilnya yaitu berupa telur. Berdasarkan evaluasi yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat (Anonim, 2003) dari 111.168 babon yang diberikan pada tahap pertama untuk siswa SD/MI di 14 kecamatan sampai awal Oktober 2003 tercatat mati 17.145 ekor atau 15,42 persen. Sedangkan yang sudah bertelur 60.776 ekor atau 54,67 persen.

Berkaitan dengan program babonisasi tersebut, bupati mengajak kepada para guru, dewan sekolah, orangtua murid dan seluruh warga masyarakat, LSM juga wartawan untuk mengawal, mendampingi dan mengawasi. Hal itu dilakukan agar program babonisasi bisa tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran. Langkah yang demikian ini dirasa tepat karena dengan adanya monitoring dan evaluasi terhadap program, maka akan membuat program tersebut berjalan lebih mengarah dan tepat sasaran. Oleh karena itu bupati setempat membuka pintu seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan masukan terhadap program yang sedang digalakkan, dan bupati justru menganggap bahwa kritik dan koreksi serta masukan program babonisasi memberikan arti agar program ini dilaksanakan sebaik-baiknya.

Beberapa masukan yang sampai kepada Bupati Bantul diantaranya berkaitan dengan program babonisasi adalah mengenai kritik dan koreksi, seperti babonisasi

dalam praktiknya jauh dari harapan, belum semua murid SD menerima babon, banyak babon yang mati, dan ada juga informasi bahwa begitu babon diterima langsung dijual. Namun demikian menurut bupati tidak seluruh kritik dan koreksi yang menyangkut babonisasi benar, akan tetapi kritik dan saran yang masuk dianggap sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas program babonisasi.

Program babonisasi diterimakan dalam dua tahap pada tahun 2003. Beberapa SD/MI yang belum menerima pada tahap I, dan baru menerima pada tahap II dalam tahun yang sama, karena menyangkut teknis pencairan dana sehingga pemberian bantuan babon dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada bulan Oktober 2003 untuk tahap I dan bulan November 2003 untuk tahap II. Jadi tidak ada persoalan yang prinsip dalam hal penyerahan babon baik pada tahap pertama maupun tahap kedua. Murid kelas I SD/MI di 17 kecamatan yang menerima babon berjumlah 10.385 siswa, dengan jumlah dana Rp 625.080.000. Sedangkan murid SD di 7 kecamatan yang menerima babon, pada tahap II berjumlah 31.822 siswa dengan dana Rp 1.909.320.000. Bagi siswa SD yang telanjur lulus dan telah diusulkan untuk menerima bantuan babon, tetapi belum menerima babon tetap memperoleh haknya untuk menerima bantuan tersebut. Jumlah siswa SD yang telah lulus dan telah diusulkan tersebut terdapat di 7 kecamatan dan berjumlah 5.996 siswa. Mereka saat ini juga telah menerima bantuan babon senilai Rp 359.760.000. Demikian juga anak-anak Bantul yang sekolah di kota Yogya juga diusulkan tetap menerima bantuan babonisasi.

Program pemberian dua anak ayam atau babonisasi dilaksanakan ke seluruh anak Sekolah Dasar di Bantul. Pemberian babon ini sebagai upaya mencerdaskan anak, bukan untuk sekadar mengentaskan kemiskinan (Anonim, 2005). Diasumsikan kualitas otak dapat meningkat salah satunya melalui asupan protein hewani, yang diupayakan dengan mengkonsumsi telur yang dihasilkan dari dua babon tersebut. Program ini sekaligus untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan anak sejak dini. Memiliki setidaknya dua anak ayam, si anak akan terpacu memeliharanya. Ini sesuai dengan besarnya potensi pengembangan wirausaha di wilayah Bantul.

Babonisasi hanya satu dari sejumlah program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Bantul yang dirasa sebagai suatu program yang populis dan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Program lain yang cukup populis adalah upaya pembelian tujuh komoditas seperti : "padi, jagung, kacang tanah, kedelai, bawang merah, cabai, dan tembakau" ke para petani hanya di saat harga komoditas-komoditas ini anjlok di pasar, terutama pada musim panen.

Komoditas-komoditas itu dibeli dengan harga di atas harga pasar supaya petani tidak merugi. Pemerintah lalu menjualnya ke Pasar Induk Kramat Jati di Jakarta. Setidaknya dua program ini telah menjadi bahan studi banding bagi kalangan pemerintah di kabupaten/kota lain, akademisi, mahasiswa, atau peneliti karena program ini dinilai inovatif dan sangat bermanfaat bagi rakyat kecil.

Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan berton-ton benih ketika pasokan benih mengalami kelangkaan dan harganya melangit. Di bidang lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul juga telah menyekolahkan sejumlah guru, di samping itu pula menggratiskan biaya pengobatan bagi seluruh ibu hamil dan warga miskin. Menurut bupati setempat, hingga kini program yang populis ini belum cukup dipahami oleh banyak pihak. Seperti pernah dituturkan Kepala Subdin Bina Program Dinas Pertanian Bantul Edy Suharyanto bahwa program bantuan penyediaan benih justru menimbulkan ketergantungan di kalangan petani.

Memelihara ayam bagi masyarakat pedesaan barangkali merupakan hal yang sangat lazim. Artinya, hampir setiap keluarga di pedesaan memelihara ayam, meskipun hanya beberapa ekor (Anonim, 2004). Namun, itulah ciri beternak ayam masyarakat pedesaan. Tidak ada yang memelihara ayam kampung sampai ratusan ekor, kecuali pengusaha ayam potong, yang umumnya bukan masyarakat pedesaan.

Memelihara ayam kampung dalam partai kecil sifatnya hanya untuk menutup kebutuhan mendadak, dengan menjual satu dua ekor ke pasar. Atau, ada kalanya untuk dikonsumsi sendiri. Itu artinya, tidak ada masyarakat pedesaan yang kaya karena memelihara ayam kampung. Namun, menurut Bupati Bantul yang sedang giat-giatnya mengadakan Gerakan Babonisasi. Ia memberikan tiga ekor ayam babon-induk ayam-kepada seluruh siswa sekolah dasar (SD) di seluruh Kabupaten Bantul secara gratis, adalah demi untuk meningkatkan kecerdasan siswa-siswa SD.

Harapan dari program itu adalah memberi gizi anak-anak sekolah. Dalam pembagiannya sudah digariskan ketika ayam pertama kali bertelur, telurnya tidak boleh ditetaskan, tetapi diharapkan agar anak penerima ayam memakan telur itu sebagai tambahan gizi.

Seekor dari tiga ekor ayam itu boleh disembelih untuk tambahan gizi anak penerima. Sedang dua ekor sisanya bisa dikembangkan, sehingga bisa menjadi sandaran rutin bagi kebutuhan protein anak-anak usia SD. Bantuan babon diberikan kepada siswa berdasarkan perhitungan per kepala. Jika dalam keluarga ada tiga atau

empat anak yang bersekolah SD, semuanya akan mendapatkan masing-masing tiga ekor babon.

Berikut wawancara dengan salah seorang dari orang tua penerima program babonisasi

"..... saya adalah warga Dusun Kuwaru, Kecamatan Srandakan, Bantul, bapak yang bekerja sebagai tukang kayu dan juga pemelihara bebek. Dua orang anak saya mendapat bantuan program babonisasi dan masing-masing memperoleh tiga ekor ayam, sampai sekarang jumlahnya sudah 12 ekor karena tiga ekor babon itu langsung bertelur dalam waktu yang hampir bersamaan semua ayam itu benar-benar diperuntukkan untuk kebutuhan gizi anak saya. Bahkan, saya nanti merencanakan bukan hanya untuk mencukupkan gizi, tetapi juga biaya sekolah. Sampai saat ini ayam tersebut telah berkembang biak dan bertelur, sebagian telur dimakan oleh anak-anak tetapi sebagian lagi ditetaskan. Dagingnyapun juga pernah kami nikmati, ya ... untuk menambah gizi anak-anak saya. Sungguh program babonisasi ini kami rasakan banyak manfaatnya, karena anak-anak saya kemudian dapat makan telur dan dagingnya. Di samping itu juga sebagian dari telur dan ayam yang telah berkembang dapat kami jual untuk menambah kebutuhan keluarga.....".

Hampir seluruh warga atau orangtua yang anaknya menerima bantuan babon dari Bupati Bantul menyatakan, bantuan itu memang tidak besar. "Kelihatannya sepele, tetapi menyenangkan karena kami merasa diperhatikan oleh pemerintah. Perhatian itu yang dirasakan menyenangkan. Bertitik tolak dari ungkapan di atas, proyek babonisasi ini nilainya memang kecil ketika berada di tangan warga masyarakat. Namun, kecil itu terasa sangat indah karena ada semacam ketulusan dari pemerintah untuk warganya.

Berikut ini wawancara dengan salah seorang guru tentang pengalamannya terkait dengan program babonisasi.

"..... saya guru SD Negeri di Kecamatan ini, ada sekitar 148 siswa di sekolah kami yang menerima babon. "Ketika datang, bantuan itu berujud uang. Kemudian, kami bagikan Rp 60.000 per siswa. Itu harus bisa mendapat tiga ekor babon, bahkan uangnya bisa sisa. Seluruh ayam siswa di SD kami rutin mendapatkan vaksin dari Sub Dinas Peternakan. "Tetapi, ya mungkin nasib, anak saya tiga orang yang di SD mendapat sembilan ekor, ee.. kok mati semua. Ada juga beberapa penerima yang ayamnya mati karena penyakit. Dari mulutnya selalu mengeluarkan darah. Beberapa saat kemudian mati. Tetapi, 75 persen penerima ayam babon di SD kami ayamnya masih hidup hingga sekarang.....".

Berbagai lapisan masyarakat di kabupaten Bantul menilai program babonisasi sangat bermanfaat sehingga perlu diteruskan. Untuk itu ada suatu desakan dari masyarakat pada tahun anggaran 2005 program pemberian bantuan kepada siswa SD sebanyak 3 ekor babon persiswa tersebut tetap direalisasikan kembali dan tidak perlu

mendengar aspirasi segelintir orang yang tidak setuju tanpa memberikan alternatif lain (Anonim, 2004).

Aspirasi untuk tetap menggulirnya program babonisasi tersebut datang dari berbagai elemen. Terakhir, aspirasi kepada Bupati Bantul disampaikan secara tertulis oleh Forum Komunikasi Dewan Sekolah Kecamatan Pejangan yang ditanda tangani ketuanya muhammad Juremi dan diketahui Camat Abani. "Dengan babonisasi dapat meningkatkan gizi keluarga, mendidik anak bertanggung jawab dan melatih mandiri, menanamkan jiwa kewirausahaan pada anak, menunjang program makan telur dan meningkatkan pendapatan keluarga, "ungkap Juremi".

Sebagaimana diketahui pada tahun anggaran 2003 program babonisasi sebagai salah satu program terobosan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan program pendidikan pada umumnya telah dilaksanakan. Disamping telah mendapatkan sambutan yang baik dari masyarakat luas program tersebut juga dikritik secara tajam.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bantul di tahun 2004 sementara meniadakan program tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selain itu Forum Komunikasi Dewan Sekolah Kecamatan Pajangan, sebagian besar FORKOM Dewan Sekolah yang lain juga menyampaikan aspirasi senada di berbagai forum, baik ketika ketemu langsung dengan bupati setempat maupun melalui surat resmi. Masyarakat yang menyampaikan langsung secara lisan antara lain ibu-ibu warga Pleret di rumah Dinas Bupati, warga Pundong saat menyampaikan aspirasinya mendukung kembalinya Drs HM Idham Samawi untuk menjabat menjadi Bupati Bantul lagi. Dalam menanggapi desakan untuk merealisasikan program babonisasi tersebut secara langsung Bupati Bantul maupun pejabat yang lain menyatakan sangat memperhatikan dan merupakan masukan yang sangat berharga, sekaligus minta partisipasi masyarakat untuk menyukseskan program populis tersebut.

Merespon hal tersebut ketua FORKOM DK Pajangan M. Juremi memberikan masukan berkaitan dengan kendala kematian ayam, solusi yang ditawarkan antara lain agar disiapkan tenaga teknis pendamping yang diambil dari babon yang dilatih dan dibimbing instansi terkait untuk diadakan lokalisasi kandang serta sosialisasi teknis pemeliharaan ayam pada keluarga. Berdasarkan hasil evaluasi disadari bahwa untuk merealisasikan program tersebut dibutuhkan dana yang besar hingga wajar jika ada segelintir orang yang mempertanyakan program tersebut. Namun demikian juga dirasakan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Bantul sangat setuju jika

dilanjutkan, sebab selain manfaat yang besar, babonisasi juga memberikan manfaat yang tak ternilai harganya yakni kesadaran keluarga mengenai penyiapan generasi yang lebih berkualitas.

Pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat esensial. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pangan yang sehat diperlukan dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang sehat, aktif dan produktif (Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan, 2002). Peningkatan kualitas SDM Indonesia merupakan kebutuhan mutlak dan merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan tujuan nasional serta meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia.

Kualitas SDM sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, status kesehatan dan pendapatan perkapita. Salah satu determinan utama status kesehatan penduduk adalah status gizi yang antara lain tergantung pada kualitas makanan yang dikonsumsi. Semakin baik kualitas makanan yang dikonsumsi diharapkan semakin baik pula tingkat kesehatan dan kualitas SDM tersebut. Namun pada kenyataannya masih banyak ditemui kehidupan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga mereka tidak mampu memberikan makanan yang cukup gizi kepada anak-anaknya terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Hal ini berakibat terhadap penurunan ketahanan fisik dan tingkat kecerdasan anak-anak tersebut.

Berkaitan dengan masalah tersebut, salah satu upayanya adalah dilaksanakan kegiatan pemberian makanan tambahan berupa telur ayam rebus kepada siswa Sekolah Dasar (SD). Telur sebagai bahan pangan yang merupakan sumber protein hewani, mempunyai peranan sangat penting dalam meningkatkan ketahanan fisik dan kecerdasan siswa sekolah dasar (SD), oleh karena itu konsumsi pangan hewani sangat dianjurkan dan perlu ditingkatkan.

Upaya meningkatkan kecerdasan siswa sekolah dasar (SD) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, patut mendapat pujian. Meski kegiatan yang dilaksanakan tidak muluk-muluk, tetapi langsung mengenai sasaran, yakni program "pembabonan" atau pemberian ayam betina kepada seluruh siswa SD.

Untuk lebih meningkatkan kecerdasan, tidak hanya dari materi yang diberikan, tetapi perkembangan dan kemampuan otak juga perlu dipertajam. Otak harus siap untuk menerima pelajaran dan itu harus didukung oleh gizi yang baik. Ditunjang pemenuhan gizi yang baik, tambahannya, daya serap pelajaran akan semakin cepat, yang pada gilirannya akan dapat mencerdaskan bangsa. Untuk itu perlu adanya keseimbangan

perkembangan antara otak kiri dengan otak kanan. Perhatian khusus tersebut, seharusnya tidak hanya kepada siswa SD, tetapi juga terhadap ibu hamil.

Rintisan awal program "pembabonan", ungkapnya, sebenarnya sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2002, dan mulai tahun 2003 ini dilakukan secara massal. Setiap siswa SD mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, diberi ayam betina (babon) tiga ekor. Anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut, tutur Bupati Bantul diambil dari APBD. Alokasi dana untuk keperluan tersebut telah disiapkan Rp 5,4 miliar. Dengan perincian jumlah siswa SD sekira 91.000 anak, setiap siswa mendapat tiga ekor ayam.

Total ayam yang diberikan gratis kepada siswa sekitar 273 babon, dan harga setiap ayam Rp 20.000,00. Setiap tahun, pihaknya harus menyediakan sekira 15.000 ekor babon. Jumlah ini diperhitungkan sesuai dengan penerimaan siswa SD per tahun. Kalau ada satu keluarga memiliki tiga anak yang masih SD, semuanya mendapat sembilan ekor babon. Berkait dengan pemenuhan gizi, maka telur ayam tersebut harus dikonsumsi oleh anak, tidak untuk yang lain, seperti dijual atau dikonsumsi oleh orang tuanya.

Setiap siswa, mendapatkan tiga ayam babon secara periodik empat tahun sekali. Hal ini disesuaikan dengan siklus ayam bertelur. Misalnya saat ini kelas 1 SD, empat tahun kemudian atau menginjak kelas empat, anak tersebut kembali mendapatkan tiga ekor ayam babon. Bupati Bantul yang pernah mendapatkan penghargaan dalam bidang perpustakaan sekolah ini juga mengatakan bahwa di balik upaya meningkatkan gizi, adalah menumbuhkembangkan rasa tanggungjawab anak. Hal ini disebabkan, bahwa siswa yang mendapatkan ayam babon tersebut akan berusaha untuk merawatnya dengan baik. Dengan adanya dorongan dari lingkungan, termasuk sekolah, siswa akan berupaya semaksimal mungkin agar ayamnya terus bertelur.

Jadi selain menambah kecukupan gizi, pemberian ayam babon ini sekaligus mendidik siswa agar belajar bertanggung jawab. Di sini juga ditanamkan bahwa ayam yang dipeliharanya, bukan milik ayah atau ibunya, tetapi milik si anak. Dengan demikian anak akan bertanggungjawab terhadap apa yang dimilikin

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program babonisasi di Kabupaten Bantul telah dilaksanakan mulai tahun 2003. Dalam program tersebut masing-masing siswa SD yang berdomisili di Kabupaten Bantul memperoleh bantuan ayam babon sebanyak 3 ekor. Tujuan dari program tersebut adalah agar tingkat kecerdasan siswa meningkat, yakni dengan mengkonsumsi telur yang dihasilkan oleh ayam bantuan. Oleh karena itu pertamakali ayam itu bertelur harus diprioritaskan untuk dikonsumsi siswa penerima bantuan, setelah itu jika ada sisa telur bisa dikonsumsi oleh yang lainnya, bahkan ditetaskan agar ayamnya menjadi berkembangbiak. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu bahwa : program babonisasi dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bantul pada umumnya dan masyarakat Srandakan pada khususnya. Kemanfaatan program babonisasi yang dirasakan oleh sebagian besar siswa penerima adalah terkait dengan pemenuhan gizi dan penambahan protein hewani.

Program babonisasi sebagaimana diketahui telah terlaksana selama tahun anggaran 2003 dan program tersebut adalah sebagai salah satu terobosan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan program pendidikan pada umumnya.

Tampaknya program ini mendapat sambutan cukup baik dari masyarakat. Tetapi juga sempat mendapat kritikan cukup pedas, sehingga pada tahun anggaran 2004 program ini ditiadakan dengan berbagai pertimbangan. Namun sepertinya sebagian masyarakat, pada tahun anggaran 2005 minta program babonisasi diteruskan kembali.

Permintaan untuk menghidupkan kembali program itu juga datang dari keluarga besar Forum Komunikasi Dewan Sekolah serta masyarakat dan ibu-ibu Bantul yang datang ke rumah dinas bupati. Menanggapi desakan masyarakat untuk merealisasikan program babonisasi tersebut Bupati Bantul menyatakan bahwa apa yang disampaikan warganya itu merupakan masukan yang cukup berharga. Untuk itu bupati akan segera melakukan koordinasi dengan pejabat lainnya, dengan harapan program itu bisa terealisasi.

Yang menarik dari hasil dengar pendapat yang pernah dilakukan, warga tidak hanya sekedar meminta tetapi juga memberi masukan serta kendala kematian ayam. Sehubungan dengan itu, maka bahkan ada sekelompok LSM yang menawarkan solusi

supaya bupati menyediakan tenaga teknis pendamping yang diambil dari penerima babon yang dilatih dan dibimbing instansi terkait.

Selain itu, agar ayam bisa hidup sehat dan berkembang diadakan lokalisasi kandang serta sosialisasi teknis pemeliharaan ayam kepada keluarga. Dengan demikian, tidak ada alasan orang lain curiga terhadap program babonisasi, karena semua terkontrol dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata sebagian besar adalah berasal dari siswa kelas 3 – 4 SD (56,00 %) dan rata-rata mereka adalah berjenis kelamin perempuan yakni ada sebanyak 32 orang (64,00 %). Pemberian bantuan ayam babon dari hasil penelitian ini telah tepat sasaran, karena sebagian besar (lebih dari 50,00 %) adalah berasal dari keluarga strata bawah. Oleh karena itu dengan kemampuan yang terbatas maka kelompok kemudian dapat memenuhi kebutuhan gizinya karena mereka memperoleh bantuan ayam babon.

Frekuensi bertelur ayam rata-rata sering, ini disampaikan oleh beberapa orang responden yang menyatakan bahwa ayam mereka sudah sering bertelur (58,00 %), kemudian yang menyatakan kadang-kadang sebanyak 12 orang (24,00 %), lalu yang menyatakan frekuensi bertelur ayam jarang sebanyak 3 orang (06,00 %) dan yang menyatakan bahwa ayam mereka sampai saat ini belum pernah bertelur ada sebanyak 6 orang (12,00 %).

Frekuensi bertelur ayam tentunya juga dipengaruhi oleh bagaimana cara pemeliharaan terhadap ayam tersebut. Rata-rata ayam babon yang diterima siswa dipelihara sendiri (62,00 %), sementara yang lainnya ada yang dipelihara oleh orang lain (18,00 %), kemudian dipelihara di sekolah (04,00 %) dan bahkan ada yang dijual yakni dilakukan oleh sebanyak 8 siswa (16,00 %).

Alasan yang disampaikan oleh para siswa mengapa mereka tidak memelihara sendiri ayam adalah karena mereka : tidak ada tempat untuk memelihara ayam di rumah, ini dipilih oleh sebanyak 9 orang siswa (47,37 %), kemudian sebanyak 3 orang (15,79 %) menyatakan ayam mereka sudah sakit-sakitan, lalu sebanyak 4 orang (21,05 %) yang memberi alasan mereka tidak telaten atau malas untuk memelihara ayam, dan sebanyak 2 orang (10,53 %) yang menyatakan mereka menjual ayam mereka demi untuk kebutuhan sekolahnya, selanjutnya ada sebanyak 1 orang (05,26 %) yang menyatakan mereka tidak bisa memelihara ayam.

Berdasarkan tujuan utama dari program “babonisasi” ini adalah sebagai pemberian tambahan gizi bagi siswa SD dengan kebiasaan untuk makan telur. Untuk itu

seharusnya telur dimanfaatkan oleh siswa SD tersebut dengan cara dikonsumsi, oleh karena itu jika kemudian telur tidak dimanfaatkan atau dikonsumsi oleh siswa melainkan untuk tujuan lain adalah merupakan tindakan yang tidak tepat sasaran, apalagi telur tersebut kemudian dijual. Namun hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memanfaatkan telur yang dihasilkan untuk dikonsumsi sendiri, sehingga secara menyeluruh program babonisasi yang dicanangkan telah mengenai sasaran, yakni membiasakan siswa SD untuk makan telur agar dapat tercukupi kebutuhan proteinnya yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kecerdasan mereka.

Kondisi mengenai perkembangan ayam sampai saat ini terlihat bahwa rata-rata adalah cukup menggembirakan. Hal ini nampak dari sebagian besar responden yang menyatakan bahwa ayam mereka sampai saat ini telah berkembang cukup banyak bahkan sangat banyak (58,00 %), sedangkan yang menyatakan bahwa ayam mereka hingga saat ini tidak berkembang hanya dinyatakan oleh sebanyak 6 orang (12,00 %), kemudian yang menyatakan bahwa ayam mereka sebagian mati ada sebanyak 3 orang (06,00 %) dan sebanyak 1 orang yang menyatakan ayam mereka semuanya sudah mati (02,00 %).

Meskipun secara keseluruhan jumlah ayam yang tidak berkembang bahkan mati adalah relatif cukup sedikit, akan tetapi hal ini perlu dipikirkan mengenai peningkatan pengetahuan dan ketrampilan siswa untuk cara-cara pemeliharaan ayam yang baik dan benar, sehingga siswa tersebut dapat mendeteksi kesehatan ayam dan melakukan tindakan preventif dan kuratif jika ayam mereka terkena penyakit. Secara menyeluruh program babonisasi untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa sudah tercapai, karena sebagian besar siswa sudah dapat memanfaatkan baik daging maupun telur dari hasil program "babonisasi" tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini sudah ada sebanyak 22 orang siswa (44,00 %) yang telah memanfaatkan daging dan telur untuk peningkatan kebutuhan gizi mereka, sementara yang baru memanfaatkan telur saja dalam mencukupi kebutuhan gizi mereka adalah sebanyak 15 orang (30,00 %), dan sebanyak 5 orang (10,00 %) yang menyatakan sampai saat ini mereka baru memanfaatkan dagingnya saja untuk mencukupi kebutuhan gizi mereka. Sedangkan ada sebanyak 8 orang (16,00 %) yang menyatakan hingga saat ini mereka tidak pernah memanfaatkan baik daging maupun telur dari ayam hasil bantuan tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka telah menjual ayamnya yang dikarenakan oleh beberapa sebab diantaranya : ayam tersebut sakit-

sakitan dan kemudian juga ada yang menjual untuk mencukupi kebutuhan sekolah siswa.

6.2. Saran

Guna memajukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maka diperlukan langkah strategis dan tepat sasaran. Salah satu program peningkatan kualitas SDM adalah dengan meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga lanjutan. Program babonisasi di Kabupaten Bantul dilakukan dengan tujuan yang sama yakni untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat menuju peningkatan kualitas SDM. Akan tetapi peningkatan kualitas SDM perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, karena tanpa usaha seperti itu tentunya hasil yang diperoleh tidak akan optimal.

Berbagai usaha yang menuju pada peningkatan SDM telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bantul diantaranya adalah : pemberian vitamin dasar, termasuk penambahan zat besi. Begitu bayi lahir, ibu dan bayinya bisa mendapat susu dan telur di pos pelayanan terpadu. Di TK seluruh anak mendapatkan makanan tambahan. Di tingkat SD, setiap anak diberi tiga ekor induk ayam dengan harapan sebagian telurnya bisa langsung dikonsumsi untuk anak bersangkutan. Program-program seperti ini sebagai upaya untuk meyakinkan orangtua bahwa anak-anak harus mendapatkan gizi yang cukup. Mereka nantinya akan bersaing dengan orang-orang bule yang tiap hari mengonsumsi telur dan susu.

Bantul satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki program memberikan induk ayam kepada anak SD. Akan tetapi berdasarkan hasil pantauan banyak ditemukan ayam mati karena waktu pembagian hampir bersamaan dengan wabah flu burung. Program babonisasi ini menimbulkan pro dan kontra karena terlihat bahwa program yang disebut dengan istilah "babonisasi" ini ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak. Di desa dan kampung-kampung, program ini cukup berhasil. Akan tetapi, bagi anak yang tinggal di perumahan, program ini justru merepotkan orangtuanya.

Masyarakat pada umumnya memang senang karena ini menunjukkan perhatian bupati pada orang kecil. Agar program yang digulirkan dapat bermanfaat optimal maka kemanfaatan program ini hendaknya dibuat dalam bentuk yang riil, dan tidak hanya untuk mengajarkan anak menyayangi binatang, melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang, dan menanamkan ide bahwa makan telur bisa membuat anak pintar. Melainkan program ini juga dikemas agar anak dapat mempunyai jiwa kewirausahaan yang tinggi

dengan memberi ketrampilan dan pengetahuan tentang cara-cara beternak ayam yang baik dan benar. Program bisa dikemas dan dimasukkan dalam kurikulum lokal atau dapat pula diberikan pada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah siswa. Dengan demikian diharapkan siswa akan dapat memperoleh keuntungan ganda, yakni di satu sisi mereka dapat mendapatkan asupan protein untuk meningkatkan kualitas SDM-nya dan memperoleh peningkatan pengetahuan dan ketrampilan mengenai cara beternak ayam yang baik dan benar di sisi lainnya. Ini selanjutnya diharapkan dapat memupuk jiwa kewirausahaan anak sejak dini, yang nantinya dapat menjadi bekal anak ke arah kemandirian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga : Suatu Teori Umum Pembangunan*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- AMA. 1993. *Local Authorities and Community Development : A Strategic Opportunity for the 1990s*, London: Association of Metropolitan Authorities Dominelli, L. (1990), *Women and Community Action*, Birmingham: Venture Press.
- Andreski, Stanislav. 1989. *Max Weber : Kapitalisme, Birokrasi Dan Agama*, Alih Bahasa: Hartono Hadikusumo, Cetakan Pertama, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Anonim. 2003. *Kecil, Angka Kematian Ayam Program Babonisasi*, http://72.14.203.104/search?q=cache:8EZvxMxvlh4J:web1.bantul.go.id/news_baca.php%3Fid%3D58+Evaluasi+Babonisasi+Bantul&hl=id.
- Anonim. 2004. *"Babonisasi Di Bantul Sepele Tetapi Menyenangkan"*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/29/jateng/827281.htm>.
- Anonim. 2004. *Rakyat Desak Program Baboinisasi Dilanjutkan*, <http://www.bantul.go.id/web.php?mod=berita.okt2004&baca=451>.
- Anonim. 2005. *Program Populis dan Jebakan Sikap Ketergantungan*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/11/humaniora/1937389.htm>.
- Bahadur, C., M.Faye, M.Kruk, J. McArthur, J. Sachs, and G. Schmidt-Traub. 2003. *Millennium Projek MDG Country Case Studies: Methodology and Very Preliminary Results*. UN Secretary General and UN Development Group.
- Depkes, RI. 1999. *Rencana Pembangunan kesehatan Menuju Indonesia Sehat Tahun 2010*. Depkes. Jakarta.
- Depkes, RI. 2000. *Profil Kesehatan Indonesia 2000*. Depkes RI dan Departemen Kesejahteraan Sosial RI. Jakarta.
- Depkes, RI and WHO. 2000. *Rencana Aksi Pangan Dan Gizi Nasional 2001-2005*. Direktorat Jendral Kemasyarakatan. Depkes RI. Jakarta.
- Depkes, RI. 2003. *Gizi dalam Angka*. Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat. Direktorat Gizi Masyarakat. Jakarta.
- Dominelli, L. 1990., *Women and Community Action*, Birmingham : Venture Press.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*, Longman : Australia.
- Mayo, M. 1998. "Community Work", dalam Adams, Dominelli dan Payne (eds), *Social Work: Themes, Issues and Critical Debates*, London: McMillan.

- Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen, Santos H. Hernandez. 1994. *The Integration of Social Work Practice*. Wadsworth, Inc., California.
- Payne, M. 1995. *Social Work and Community Care*, London: McMillan.
- Prijono, Onny S dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS
- Purwaningsih, Sri. 2004. *Konsep Pembangunan Rakyat Miskin Di Era Otonomi Daerah*, Sri_Purwaningsih.Pdf.
- Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan. 2002. *Panduan Kaji Tindak Pemberian Makanan Tambahan Telur Ayam Rebus Dalam Rangka Peningkatan Ketahanan Fisik Siswa Sekolah Dasar*, <http://iptek.apjii.or.id/artikel/pangan/DEPTAN/materi-pendukung/kaji%20tindak.htm>.
- Rappaport, J. 1984. *Studies in Empowerment: Introduction to the Issue*, Prevention In Human Issue, USA.
- Sibuea, Posman. 2002. *Perbaikan Gizi Anak Sekolah Sebagai Investasi SDM*, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0209/09/opini/perb30.htm>
- Soekirman. 2003. *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Dirjen Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Edisi Pertama, Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Suharto, Edi. 2002. *Motodologi Pengembangan Masyarakat*, <http://www.policy.hu/suharto/others5.html>.
- Suharto, Edi. 2003. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsepsi Dan Strategi*, <http://www.policy.hu/suharto/makIndo34.html>
- Sumodiningrat, Gunawan. 2000. "Visi dan Misi Pembangunan dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat", dalam *Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru*, 20 Mei 2000, Yogyakarta: IDEA.
- Sunaryo, E.S. 2003. "Regulasi dan Teknologi Makanan Pendamping ASI". Seminar Nasional *Teknologi, Regulasi, dan Review Mutakhir Peran Makanan pendamping ASI*. Program Studi Teknologi Hasil Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Andalas. Padang. Sumatra.
- Swift, C., & G. Levin. 1987. *Empowerment: An Emerging Mental Health Technology*, Journal of Primary Prevention, USA.
- Twelvetrees, A. 1991. *Community Work*, London: McMillan.
- Unicef. 1998. *The State of The World Children 1998*. New York. Oxford university. Press.

Winami, Tri. 1998. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media.





KUESIONER

**“Babonisasi” Sebagai Usaha Pemberdayaan Masyarakat
Dalam Menciptakan Kecukupan Gizi Keluarga
(Studi Evaluasi tentang Pelaksanaan Program “Babonisasi Di Kecamatan
Srandakan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
JULI 2005**

No. Resp :

Identitas Penerima Bantuan

01. Alamat Sekolah Penerima Bantuan :

.....
.....
.....

02. Nama Sekolah :

03. Kelas :

04. Jenis Kelamin Penerima Bantuan : Laki-laki/Perempuan

Identitas Orang Tua dan Keluarga Penerima Bantuan

05. Alamat Orang Tua Penerima Bantuan :

- a. No. rumah :
- b. RT/RW :/.....
- c. Kelurahan :
- d. Kecamatan :
- e. Kabupaten : Bantul

06. Jumlah saudara kandung yang memperoleh bantuan ayam dari program "babonisasi" ?

..... orang

07. Dimana saja asal sekolah saudara kandung yang memperoleh bantuan ayam tersebut ?

.....
.....

08. Jumlah saudara kandung seluruhnya Orang

09. Usia saudara kandung:

- a. Anak I tahun
- b. Anak II tahun
- c. Anak III tahun
- d. Anak IV tahun
- e. Anak V tahun

10. Status rumah yang ditempati keluarga saat ini ?

- a. Milik sendiri
- b. Menumpang
- c. Menyewa
- d. Lainnya, sebutkan

Status Sosial Ekonomi Keluarga

11. Pekerjaan utama ibu saat ini ?

a. Punya

b. Tidak punya

Jika punya tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaannya

.....
.....
.....
.....
.....

12. Pekerjaan sampingan ibu ?

a. Punya

b. Tidak punya

Jika punya tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaannya

.....
.....
.....
.....
.....

13. Pekerjaan utama ayah ?

a. Punya

b. Tidak punya

Jika punya tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaannya

.....
.....
.....
.....
.....

14. Pekerjaan sampingan ayah ?

a. Punya

b. Tidak punya

Jika punya tulis selengkap-lengkapnya jenis pekerjaannya

.....
.....
.....
.....
.....

15. Berapa rata-rata penghasilan ibu dalam sebulan ?

.....
.....
.....

16. Berapa rata-rata penghasilan ayah dalam sebulan ?

.....
.....
.....

17. Berapa penghasilan rata-rata keluarga satu bulan?
(Tuliskan jumlah pendapatan ibu dan ayah dalam sebulan)

.....
.....
.....
.....
.....

18. Barang-barang berharga apa saja yang dimiliki keluarga ?

- a. Sepeda motor, jumlah
- b. Komputer, jumlah
- c. Kulkas, jumlah
- d. Mesin cuci, jumlah
- e. Sepeda, jumlah
- f. LCD/VCD, jumlah
- g. Telephone, jumlah
- h. Hanphone, jumlah
- i. Mesin jahit, jumlah
- j. Rice cooker, jumlah
- k. Lainnya, sebutkan

19. Jenis lantai rumah yang ditempati keluarga saat ini ?

- a. Tanah
- b. Plesteran
- c. Tegel abu-abu
- d. Keramik
- e. Teraso
- f. Lainnya, sebutkan

20. Jenis atap rumah yang ditempati keluarga sekarang ?

- a. Sirap
- b. Seng
- c. Genting biasa
- d. Genting beton
- e. Lainnya, sebutkan

21. Bagaimana pembagian ruangan yang terjadi dalam rumah ?

- a. Tidak ada pembagian ruangan
- b. Kamar tamu menjadi satu dengan ruang keluarga

- c. Masing-masing kamar atau ruangan terpisah sesuai dengan fungsinya masing-masing
- d. Lainnya, sebutkan

Realisasi “Babonisasi” dalam Orientasi Pemberdayaan Masyarakat

22. Apakah ayam babon yang diberikan dalam program “Babonisasi” masih ada saat ini ?
 - a. Masih utuh, jumlah ekor
 - b. Tinggal sebagian, jumlah ekor
 - c. Tidak ada, karena
23. Sejak kapan responden memperoleh bantuan ayam babon ?
(tanggal, bulan, dan tahun pemberian)
.....
24. Apakah sejak bantuan ayam diberikan telah menghasilkan telur ayam ?
 - a. Ya, jumlahnya kira-kira
 - b. Belum, karena
25. Apabila bantuan ayam telah menghasilkan telur, apakah selama ini telur tersebut telah dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga ?
 - a. Ya, siapa saja yang memanfaatkan
 - b. Tidak, karena
26. Siapa saja selama ini yang memelihara ayam bantuan tersebut ?
.....
.....
.....
27. Bagaimana cara pemeliharaan ayam bantuan dilakukan selama ini?
.....
.....
.....
28. Apakah selama ini ada monitoring atau pemantauan terkait dengan program “Babonisasi” tersebut ?
.....
.....
.....

29. Siapa saja yang melakukan tugas monitoring atau pemantauan program “Babonisasi” di atas ?
.....
.....
.....
30. Berapa kali monitoring atau pemantauan yang telah dilakukan petugas selama ini ?
.....
.....
.....
31. Apakah selama ini ada kendala serius yang dirasakan dalam memelihara ayam bantuan yang diberikan dalam program “Babonisasi” ?
.....
.....
.....
32. Jika ada kendala atau kesulitan yang terjadi selama memelihara ayam, apakah sudah dapat dipecahkan ?
a. Sudah, siapa yang memecahkan masalah tersebut?
.....
b. Tidak dapat, karena
33. Usulan dan keinginan yang diajukan untuk perbaikan program “Babonisasi”
.....
.....
.....

CATATAN-CATATAN :



KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA KEPADA PARA RESPONDEN YANG TELAH SUDI MEMBERIKAN WAKTU BAGI KAMI DALAM PENELITIAN INI. SEBAGAI MANUSIA BIASA KAMI MOHON MA'AF YANG SEDALAM-DALAMNYA JIKA TERJADI KESALAHAN BAIK YANG KAMI SENGAJA MAUPUN TIDAK KAMI SENGAJA. DAN SEMOGA HUBUNGAN BAIK INI DAPAT TETAP TERBINA UNTUK MASA-MASA YANG AKAN DATANG.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 830

Membaca Surat : **UAJY Yogyakarta Nomor : 193/Eks/LPU/05 Tanggal : 10 Agustus 2005**
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

Diizinkan kepada :

Nama : **Dra. E. Yuningtyas Sotyawati, M.Si.** No. Mhs/NIM: -

Judul : **BABONISASI SEBAGAI USAHA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN KECUKUPAN GIZI KELUARGA (STUDI EVALUASI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM 'BABONISASI DI KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL PROPINSI DIY).**

Lokasi : **Kec. Srandakan**

Waktu : **Mulai pada tanggal : 16 Agustus 2005 s/d 16 Nopember 2005**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat pemerintah setempat (dinas/instansi/camat/lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para pejabat pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Tembusan dikirim kepada yth. :

1. Bpk. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbang Linmas Kab. Bantul
3. Ka. Dinas P & K Kab. Bantul
4. Camat Srandakan
5. Ka. Cab. Dinas P & K Kec. Srandakan
6. Lurah Desa Poncosari & Trimurti
7. Ka. SDN I Srandakan
8. Yang bersangkutan
9. Bertinggal

Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : **16 Agustus 2005**



a.n. Bupati Bantul
Kepala Bappeda Kab. Bantul
Kab. Sekretaris,

Drs. Sujono

NIP. 010 162 494